



PROFIL DISKOMINFO KOTA SOLOK 2025

MENGUATKAN INFORMASI, MENDORONG
TRANSFORMASI DIGITAL



KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Puji syukur kehadirat Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya sehingga Buku Profil Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Solok Tahun 2025 dapat disusun dan diselesaikan dengan baik. Buku profil ini disusun sebagai media informasi dan dokumentasi mengenai gambaran umum perangkat daerah, tugas dan fungsi, program dan kegiatan, layanan, sumber daya, serta capaian pelaksanaan urusan komunikasi, informatika, statistik, dan persandian di Kota Solok.

Penyusunan buku profil ini bertujuan untuk memberikan informasi kepada masyarakat, perangkat daerah, dan pemangku kepentingan terkait mengenai peran dan kontribusi Dinas Komunikasi dan Informatika dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan berbasis elektronik, keterbukaan informasi publik, pengembangan teknologi informasi dan komunikasi, pengelolaan statistik sektoral, serta penguatan tata kelola data dan layanan digital daerah.

Kami menyadari bahwa buku profil ini masih memiliki keterbatasan, sehingga kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan demi penyempurnaan di masa mendatang. Semoga Buku Profil Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Solok Tahun 2025 ini dapat memberikan manfaat dan menjadi salah satu sumber informasi yang berguna bagi seluruh pihak.

Terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan dan kontribusi dalam penyusunan buku profil ini.

Wassalamu'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.



Solok, 10 Desember 2025
Kepala Dinas Komunikasi dan
Informatika

Nurzal Gustim, S.STP, M. Si
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 197809271997111001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Maksud dan Tujuan	2
C. Ruang Lingkup Penyusunan	3
D. Dasar Hukum	4
E. Metodologi Penyusunan	4
1. Sumber Data	4
2. Pengumpulan Data	4
3. Pengolahan dan Analisis Data	5
4. Verifikasi dan Validasi	5
5. Penyajian	6
6. Output	6
F. Sistematika Penulisan Buku Profil	7
BAB II GAMBARAN UMUM	8
A. Identitas Umum	8
B. Kedudukan	9
C. Tugas Pokok	9
1. Kepala Dinas	10
2. Sekretaris	11
3. Bidang Informasi dan Komunikasi Publik	11
4. Bidang Informatika dan Persandian	12
5. Bidang Tata Kelola <i>E-Government</i> dan Statistik	14
6. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	15
7. Seksi Persandian	16
8. Seksi Statistik	17

BAB III PROGRAM, CAPAIAN DAN INOVASI	20
A. Program Dinas Komunikasi dan Informatika	20
B. Kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika	21
C. Capaian Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika	27
D. Inovasi Dinas Komunikasi dan Informatika	32
BAB IV DATA SEKTORAL DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	34
A. Gambaran Umum Data Sektoral yang dihasilkan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika	34
B. Jenis dan Daftar Data Sektoral	34
1. Sumber Daya Manusia	34
2. Kompilasi Data Sektoral dari Bidang	38
C. Capaian Realisasi Data Sektoral	40
1. Bidang Informatika dan Persandian	41
2. Bidang Informasi dan Komunikasi Publik	68
3. Bidang Tata Kelola <i>E-Government</i> dan Statistik	70
BAB V PENUTUP	81
A. Kesimpulan	81
B. Arah Pengembangan ke Depan	81
LAMPIRAN	83

DAFTAR TABEL

3	Program, Capaian Dan Inovasi	20
3.1	Program Dinas Komunikasi Dan Informatika	20
3.2	Kegiatan Dinas Komunikasi Dan Informatika	22
3.3	Indikator Kinerja Utama Dinas Komunikasi Dan Informatika	28
3.4	Indikator Kinerja Kunci Dinas Komunikasi Dan Informatika	28
4	Data Sektoral Dinas Komunikasi Dan Informatika	34
4.1	Sumber Daya Manusia Dinas Komunikasi Dan Informatika	34
4.2	Jumlah PNS Berdasarkan Pangkat	35
4.3	Jumlah SDM Berdasarkan Pendidikan	35
4.4	Jumlah SDM Berdasarkan Jabatan	35
4.5	Kompilasi Data Sektoral Yang Dihimpun Dari Masing-Masing Bidang	38
4.6	Capaian Realisasi Data Sektoral Pada Bidang Informatika Dan Persandian	41
4.7	Daftar Website Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kota Solok	42
4.8	Daftar Aplikasi Layanan Publik Pemerintah Kota Solok	48
4.9	Daftar Aplikasi Layanan Pemerintah Kota Solok	52
4.10	Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Dan UPTD Yang Terhubung Jaringan Internet	59
4.11	Daftar Pemetaan Blankspot Di Kota Solok Tahun 2025	63
4.12	Daftar E-Mail Resmi Perangkat Daerah	65
4.13	Capaian Realisasi Data Sektoral Pada Bidang Informasi Dan Komunikasi	68

4.14	Daftar Media Online Dan Cetak Yang Berlangganan Tahun 202569
4.15	Capaian Realisasi Data Sektoral Pada Bidang Tata Kelola E-Government Dan Statistik70
4.16	Rincian Hasil Evaluasi SPBE Tahun 202571
4.17	Daftar Data E-Walidata Tahun 202472
4.18	Data CCTV Area Publik Hingga Tahun 202578

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1	Grafik SDM Berdasarkan Pangkat36
Gambar 4.2	Grafik SDM Berdasarkan Pendidikan37
Gambar 4.3	Grafik SDM Berdasarkan Jabatan37

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) yang semakin pesat telah mendorong perubahan signifikan dalam tata kelola pemerintahan, pelayanan publik, serta pola komunikasi antara pemerintah dan masyarakat. Dalam konteks tersebut, Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Solok memiliki peran strategis sebagai motor penggerak transformasi digital di lingkungan Pemerintah Kota Solok, sekaligus sebagai penyedia layanan informasi publik yang transparan, akurat, dan terpercaya.

Sebagai salah satu perangkat daerah yang mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan berbasis elektronik (SPBE), keterbukaan informasi publik, serta penguatan literasi digital masyarakat, Dinas Kominfo dituntut untuk memiliki arah kebijakan dan strategi yang jelas, disertai dengan data dan informasi kelembagaan yang lengkap. Oleh karena itu, penyusunan Buku Profil Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Solok menjadi penting sebagai sarana dokumentasi dan publikasi yang menggambarkan secara utuh mengenai kedudukan, tugas, fungsi, struktur organisasi, sumber daya, program dan kegiatan, serta capaian kinerja Dinas Kominfo.

Dalam penyelenggaraan pembangunan daerah yang semakin kompleks dan dinamis, kebutuhan akan data yang akurat, mutakhir, terintegrasi, dan dapat dipertanggungjawabkan menjadi semakin penting. Data tidak hanya berfungsi sebagai bahan pendukung administrasi, tetapi telah menjadi dasar utama dalam perumusan kebijakan, perencanaan pembangunan, serta pelaksanaan monitoring dan evaluasi kinerja pemerintah daerah.

Sejalan dengan hal tersebut, penguatan tata kelola data melalui implementasi prinsip Satu Data Indonesia menjadi salah satu prioritas dalam mewujudkan sistem statistik yang andal dan terintegrasi. Dalam konteks ini, Dinas Komunikasi dan Informatika memiliki peran strategis sebagai wali data yang bertanggung jawab dalam pengelolaan data sektoral, termasuk dalam memastikan ketersediaan data yang memenuhi standar, memiliki metadata yang jelas, serta dapat diakses dan dimanfaatkan oleh berbagai pihak.

Data sektoral yang dihasilkan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika tidak hanya digunakan untuk mendukung kebutuhan internal perangkat daerah, seperti penyusunan perencanaan program dan evaluasi kinerja, tetapi juga dimanfaatkan oleh perangkat daerah lainnya dalam menyusun kebijakan lintas sektor. Selain itu, data tersebut juga memiliki peran penting dalam mendukung keterbukaan informasi publik, sehingga dapat diakses oleh masyarakat sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan.

Dalam praktiknya, pengelolaan data sektoral telah menunjukkan perkembangan yang signifikan, di mana proses identifikasi kebutuhan data, pengumpulan, pengolahan, hingga diseminasi telah dilaksanakan berdasarkan prosedur baku yang berlaku. Hal ini mencerminkan tingkat kematangan tata kelola data yang semakin baik, khususnya dalam memastikan relevansi data terhadap kebutuhan pengguna, baik internal maupun eksternal.

Namun demikian, masih terdapat tantangan yang perlu diatasi, antara lain terkait dengan peningkatan kualitas data, penguatan integrasi antar sumber data, serta optimalisasi pemanfaatan data oleh seluruh pemangku kepentingan. Oleh karena itu, diperlukan suatu dokumen profil Dinas Komunikasi dan Informatika yang tidak hanya menyajikan gambaran umum kelembagaan, tetapi juga secara komprehensif menggambarkan data sektoral yang dihasilkan, tingkat kematangan pengelolaannya, serta pemanfaatannya dalam mendukung pembangunan daerah

B. Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Penyusunan Buku Profil Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Solok dimaksudkan sebagai sarana informasi, publikasi, dan dokumentasi resmi yang memberikan gambaran menyeluruh tentang kelembagaan dan kinerja Dinas Kominfo. Buku ini juga dimaksudkan untuk menghimpun dan menata kembali seluruh data, informasi, dan infografis kelembagaan agar tersaji secara sistematis, menarik, dan mudah dipahami oleh pembaca.

2. Tujuan

- a. Menyajikan informasi yang lengkap, akurat, dan mutakhir mengenai profil kelembagaan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Solok.

- b. Menjadi acuan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program serta kebijakan di bidang komunikasi dan informatika.
- c. Menginventarisasi dan mendokumentasikan data sektoral yang dihasilkan secara sistematis dan terstandar;
- d. Menjadi media promosi kelembagaan dan komunikasi publik bagi pemerintah daerah, mitra kerja, serta masyarakat luas.
- e. Mendorong terwujudnya tata kelola pemerintahan yang informatif, transparan, dan akuntabel sesuai prinsip *good governance*.

C. Ruang Lingkup Penyusunan

Ruang lingkup penyusunan Buku Profil Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Solok mencakup seluruh aspek kelembagaan, penyelenggaraan urusan pemerintahan, serta data dan informasi pendukung yang menggambarkan pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Kominfo secara menyeluruh.

Secara garis besar, ruang lingkup penyusunan buku profil ini meliputi:

1. Gambaran Umum Dinas Komunikasi dan Informatika
Menjelaskan dasar hukum pembentukan, kedudukan, tugas pokok dan fungsi, serta peran strategis Dinas Kominfo dalam struktur pemerintahan daerah Kota Solok.
2. Struktur Organisasi dan Sumber Daya Manusia
Memuat uraian struktur organisasi, pejabat dan staf pelaksana, serta profil sumber daya manusia yang mendukung pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Kominfo.
3. Program, Kegiatan, dan Inovasi dan Capaian Kinerja
Menyajikan informasi mengenai program prioritas, kegiatan unggulan, inovasi digital, serta capaian yang telah dilaksanakan oleh Dinas Kominfo dalam mendukung transformasi digital dan pelayanan publik di Kota Solok.
4. Data Sektoral dan Infografis Kelembagaan
Mendokumentasikan data, statistik, serta infografis yang menggambarkan capaian kinerja, perkembangan SPBE, keterbukaan informasi publik, pengelolaan data statistik sektoral, keamanan informasi, dan infrastruktur TIK.

D. Dasar Hukum

Penyusunan Buku Profil Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Solok berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah, antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016;
4. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE);
5. Peraturan Presiden Nomor 39 tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia
6. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia terkait urusan komunikasi, informatika, statistik, dan persandian;
7. Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Solok;
8. Peraturan Wali Kota Solok Nomor 28 Tahun 2013 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Solok.

E. Metodologi Penyusunan

1. Sumber Data

Dalam penyusunan buku Profil Dinas Komunikasi dan Informatika tahun 2025, bersumber dari Sekretariat, Bidang Informatika dan Persandian, Bidang Komunikasi dan Informasi Publik dan Bidang Tata Kelola E-Government dan Statistik

2. Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan secara sistematis dengan melibatkan seluruh unit kerja di lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika. Proses ini diawali dengan penyusunan instrumen atau format pengumpulan data yang

disesuaikan dengan kebutuhan profil, sehingga data yang diperoleh memiliki struktur yang seragam dan mudah diolah. Selanjutnya, data dikumpulkan melalui pengisian instrumen oleh masing-masing bidang yang bertanggung jawab terhadap data sektoralnya. Untuk memperkuat kualitas data, dilakukan pula wawancara dan koordinasi langsung dengan pengelola data guna menggali informasi yang lebih mendalam serta memastikan pemahaman yang sama terhadap definisi dan cakupan data. Selain itu, pengumpulan data juga dilakukan melalui studi dokumentasi terhadap dokumen resmi serta penelusuran sistem informasi dan aplikasi yang digunakan dalam pengelolaan data. Pendekatan ini bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh data yang relevan dapat teridentifikasi dan terdokumentasi dengan baik.

3. Pengolahan dan Analisis Data

Data yang telah terkumpul kemudian melalui tahap pengolahan dan analisis untuk menghasilkan informasi yang bermakna. Tahapan awal dilakukan dengan mengklasifikasikan dan mengelompokkan data berdasarkan jenis, urusan, dan bidang terkait, sehingga memudahkan dalam proses analisis lebih lanjut. Selanjutnya dilakukan proses pembersihan (data cleaning) untuk memastikan data yang digunakan bebas dari kesalahan, duplikasi, maupun ketidakkonsistenan. Setelah itu, data dianalisis secara deskriptif untuk menggambarkan kondisi eksisting, capaian kinerja, serta peran Dinas Kominfo dalam pengelolaan data dan informasi. Dalam proses ini, juga dilakukan penyesuaian data dengan prinsip Satu Data Indonesia, yang mencakup pemenuhan standar data, penyediaan metadata, penggunaan kode referensi, serta upaya mendukung interoperabilitas data. Hal ini penting untuk memastikan bahwa data yang dihasilkan tidak hanya akurat, tetapi juga dapat digunakan lintas sektor.

4. Verifikasi dan Validasi

Untuk menjamin kualitas dan keandalan data, dilakukan proses verifikasi dan validasi secara berlapis. Verifikasi dilakukan dengan cara membandingkan data antar dokumen serta antar bidang untuk memastikan konsistensi dan kesesuaian informasi. Selanjutnya, dilakukan klarifikasi kepada penanggung jawab data pada masing-masing bidang apabila ditemukan perbedaan atau ketidaksesuaian data. Proses ini penting untuk

memastikan bahwa data yang digunakan benar-benar mencerminkan kondisi yang sebenarnya. Validasi akhir dilakukan oleh tim penyusun bersama pejabat terkait guna memastikan bahwa seluruh data dan informasi yang disajikan telah sesuai dengan dokumen resmi serta standar yang berlaku. Dengan demikian, hasil akhir yang dihasilkan dapat dipertanggungjawabkan secara administratif maupun substansi.

5. Penyajian

Data yang telah melalui proses pengolahan, verifikasi, dan validasi selanjutnya disajikan dalam bentuk yang informatif dan mudah dipahami. Penyajian dilakukan secara sistematis dengan menggabungkan narasi deskriptif, tabel, grafik, serta infografis guna memperjelas informasi yang disampaikan. Narasi deskriptif digunakan untuk memberikan penjelasan kontekstual terhadap data, sementara tabel dan grafik digunakan untuk menyajikan data secara ringkas dan terstruktur. Dalam beberapa bagian, infografis juga digunakan untuk meningkatkan daya tarik serta memudahkan pemahaman pembaca. Penyajian ini dirancang agar dapat memenuhi kebutuhan berbagai pemangku kepentingan, baik internal maupun eksternal, dalam memahami kondisi, peran, dan capaian Dinas Komunikasi dan Informatika.

6. Output

Hasil akhir dari proses penyusunan ini adalah Buku Profil Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2025 yang memuat informasi komprehensif mengenai kelembagaan, sumber daya, serta kinerja dinas. Buku ini diharapkan dapat menjadi dokumen referensi yang valid dan terpercaya. Selain itu, kegiatan ini juga menghasilkan kumpulan data sektoral yang telah terdokumentasi dengan baik dan dapat digunakan sebagai basis data dalam mendukung perencanaan, monitoring, evaluasi, serta pengambilan kebijakan. Keberadaan data yang terstruktur ini juga mendukung implementasi Satu Data Indonesia di tingkat daerah. Secara lebih luas, output yang dihasilkan diharapkan dapat menjadi bahan informasi bagi pemangku kepentingan dalam memahami peran strategis Dinas Kominfo, sekaligus meningkatkan transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan berbasis data.

F. Sistematika Penulisan Buku Profil

Untuk memudahkan penyajian informasi, Buku Profil Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Solok disusun dengan sistematika sebagai berikut:

1. Bab I : Pendahuluan
2. Bab II : Gambaran Umum Dinas Kominfo
3. Bab III : Program, Capaian, dan Inovasi
4. Bab IV : Data Sektoral Dinas Komunikasi dan Informatika
5. Bab V : Penutup
6. Lampiran

BAB II GAMBARAN UMUM

Gambaran umum menguraikan identitas umum, kedudukan, tugas dan fungsi, struktur organisasi serta sumber daya manusia pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Solok

A. Identitas Umum

Nama Lengkap Dinas	Dinas Komunikasi dan Informatika
Kedudukan dalam struktur pemerintahan daerah	Pelaksana fungsi inti yang melaksanakan tugas dan fungsi sebagai pembantu kepala daerah dalam melaksanakan fungsi mengatur dan mengurus bidang komunikasi dan informatika, statistik, serta persandian yang menjadi kewenangan daerah..
Alamat dan kontak (telepon, email, website)	 Jalan Lubuk Sikarah No.89 Kota Solok, Komplek Balaikota Solok Gedung G Kelurahan IX Korong, Kecamatan Lubuk Sikarah, Kota Solok, Sumatera Barat 27317
	 https://kominfo.solokkota.go.id/
	 +62 852-1303-2648
	 Diskominfo Kota Solok
	 diskominfokotasolok
Dasar hukum pembentukan (Perda/Perwako tentang pembentukan OPD)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah; 2. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2018 tentang Perangkat Daerah; 3. Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016; 4. Peraturan Walikota Solok Nomor : 18 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan

	<p>Walikota Solok Nomor 36 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah;</p> <p>5. Peraturan Wali Kota Solok Nomor 28 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika</p>
--	--

B. Kedudukan

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Solok merupakan perangkat daerah yang termasuk kedalam susunan Dinas Daerah dengan Tipe B yang menyelenggarakan urusan bidang komunikasi dan informatika, urusan bidang persandian dan urusan bidang statistik.

Selanjutnya berdasarkan Peraturan Walikota Nomor 28 Tahun 2023 tentang kedudukan, struktur organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Dinas Komunikasi dan Informatika. Dinas Komunikasi dan Informatika merupakan unsur pelaksana urusan pemerintah di Bidang Komunikasi dan Informatika, Bidang Statistik dan Bidang Persandian yang menjadi kewenangan daerah. Dinas Komunikasi dan Informatika dipimpin oleh Kepala Dinas dan berada di bawah serta bertanggung jawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.

C. Tugas Pokok

Secara umum, Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Kota Solok memiliki tugas membantu Wali Kota dalam melaksanakan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan di bidang komunikasi dan informatika, statistik, dan persandian. Fungsi yang dijalankan mencakup perumusan kebijakan teknis, pelaksanaan dan pengendalian kebijakan, penyusunan program serta pelaksanaan evaluasi dan pelaporan, pelaksanaan administrasi dinas serta pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota pada setiap bidang urusan yang menjadi kewenangan.

Dalam menjalankan perannya, Dinas Komunikasi dan Informatika berkomitmen untuk mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan daerah yang

efektif, transparan, dan berbasis teknologi informasi. Melalui penguatan infrastruktur digital, peningkatan keterbukaan informasi publik, pengelolaan data statistik sektoral, dan penyelenggaraan sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE), Dinas Kominfo berperan sebagai penggerak utama transformasi digital di lingkungan Pemerintah Kota Solok.

Cakupan kerja Dinas Komunikasi dan Informatika meliputi seluruh wilayah administratif Kota Solok yang terdiri dari dua kecamatan dan 13 kelurahan. Dengan semangat inovasi dan pelayanan publik, Dinas Kominfo terus berupaya mewujudkan masyarakat digital yang informatif, adaptif terhadap teknologi, serta mendukung visi Kota Solok “Maju dan Sejahtera melalui Peningkatan Pelayanan Publik dan Inovasi Daerah.”.

Pada Peraturan Walikota Kota Solok Nomor 28 tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja. Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Solok, dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh Sekretaris Dinas dan beberapa Kepala Bidang. Struktur organisasi Dinas Kominfo meliputi Sekretariat, Bidang Informasi dan Komunikasi Publik, Bidang Informatika dan Persandian, serta Bidang Tata Kelola E-Government dan Statistik, dengan uraian tugas jabatan struktural Dinas Komunikasi dan Informatika adalah sebagai berikut:

1. Kepala Dinas

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Solok mempunyai tugas membantu Walikota untuk melaksanakan urusan komunikasi dan informatika, urusan statistik dan urusan persandian yang menjadi kewenangan daerah.

Dalam melaksanakan tugas, Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Solok menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang komunikasi dan informatika, statistik dan persandian;
- b. pelaksanaan kebijakan teknis di bidang komunikasi dan informatika, statistik dan persandian;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang komunikasi dan informatika, statistik dan persandian;
- d. pelaksanaan administrasi dinas di bidang komunikasi dan informatika, statistik dan persandian; dan

- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

2. Sekretaris

Sekretaris mempunyai tugas mengkoordinasikan dan mengelola pelaksanaan administrasi persuratan, kerumahtangaan, protokoler, kehumasan, administrasi barang/asset, administrasi kepegawaian dan akuntansi dan administrasi keuangan.

Untuk menyelenggarakan tugasnya, sekretaris mempunyai fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, penyusunan rencana dan program kerja, serta pengelolaan pelayanan kesekretariatan;
- b. perumusan kebijakan teknis dan pengoordinasian penyusunan rencana dan program kerja Dinas;
- c. penyusunan rencana strategis, rencana kerja, dan perjanjian kinerja Dinas;
- d. pengoordinasian penyusunan rencana anggaran Dinas;
- e. penyelenggaraan dan pengelolaan tata usaha, kearsipan, perpustakaan, kerumahtangaan, kepegawaian, keuangan dan perlengkapan;
- f. penyelenggaraan kehumasan dan keprotokolan lingkup Dinas;
- g. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan tugas pengelolaan pelayanan kesekretariatan;
- h. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Dinas;
- i. penyusunan bahan laporan penyelenggaraan pemerintah daerah, laporan akuntabilitas kinerja dan laporan rencana aksi reformasi birokrasi, dan laporan pertanggungjawaban Dinas;
- j. pengoordinasian penyusunan laporan keuangan Dinas;
- k. pengoordinasian dan fasilitasi kegiatan Bidang; dan
- l. pelaksanaan Fungsi lain yang diberikan oleh atasan.

3. Bidang Informasi dan Komunikasi Publik

Bidang Informasi dan Komunikasi Publik mempunyai tugas penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan di Bidang Informasi dan Komunikasi Publik. Dalam melaksanakan tugasnya, bidang ini memiliki fungsi :

- a. merencanakan program kerja bidang informasi dan komunikasi publik berdasarkan ketentuan perundang-undangan;

- b. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan fungsi dan tanggung jawabnya;
- c. memeriksa hasil pekerjaan bawahan berdasarkan hasil kerja untuk mengetahui adanya kesalahan atau kekeliruan serta upaya penyempurnaannya;
- d. memberi petunjuk dan menyelia pekerjaan bawahan sesuai dengan fungsi dan tanggung jawabnya;
- e. mengoordinasikan penyiapan penyusunan kebijakan dibidang informasi dan komunikasi publik berdasarkan prosedur dan ketentuan perundang-undangan;
- f. menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang informasi dan komunikasi publik;
- g. menyiapkan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria penyelenggaraan di bidang informasi dan komunikasi publik;
- h. menyiapkan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang informasi dan komunikasi publik;
- i. mengoordinir dan memfasilitasi penyelenggaraan kehumasan Pemerintah Daerah;
- j. mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas sesuai dengan prosedur dan ketentuan perundang-undangan sebagai bahan pertimbangan bagi pimpinan; dan
- k. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan baik lisan maupun tertulis sesuai dengan tugas dan fungsi ketentuan perundang-undangan.

4. Bidang Informatika dan Persandian

Bidang Informatika dan Persandian mempunyai tugas penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pusat data, sistem jaringan intra Pemerintah Daerah, aplikasi dan proses bisnis pemerintah berbasis elektronik, sistem penghubung layanan pemerintah, sistem komunikasi intra pemerintah daerah dan persandian untuk pengamanan informasi. Dalam melaksanakan tugasnya, Bidang Informatika dan Persandian memiliki fungsi :

- a. merencanakan program kerja bidang aplikasi informatika dan persandian berdasarkan ketentuan perundang-undangan;
- b. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan fungsi dan tanggung jawabnya;
- c. memberi petunjuk dan menyelia pekerjaan bawahan sesuai dengan fungsi dan tanggung jawabnya;
- d. memeriksa hasil pekerjaan bawahan berdasarkan hasil kerja untuk mengetahui adanya kesalahan atau kekeliruan serta upaya penyempurnaannya;
- e. mengoordinasikan penyiapan penyusunan kebijakan dibidang informatika persandian berdasarkan prosedur dan kebijakan yang berlaku;
- f. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang pusat data, sistem jaringan intra Pemerintah Daerah, aplikasi dan proses bisnis pemerintah berbasis elektronik, sistem penghubung layanan pemerintah, sistem komunikasi intra Pemerintah Daerah dan persandian untuk pengamanan informasi;
- g. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria penyelenggaraan dibidang pusat data, sistem jaringan intra Pemerintah Daerah, aplikasi, proses bisnis pemerintah berbasis elektronik, sistem penghubung layanan pemerintah, sistem komunikasi intra Pemerintah Daerah dan persandian untuk pengamanan informasi;
- h. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi dibidang pusat data, sistem jaringan intra Pemerintah Daerah, aplikasi, proses bisnis pemerintah berbasis elektronik, sistem penghubung layanan pemerintah, sistem komunikasi intra Pemerintah Daerah dan persandian untuk pengamanan informasi;
- i. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pusat data, sistem jaringan intra Pemerintah Daerah, aplikasi, proses bisnis pemerintah berbasis elektronik, sistem penghubung layanan pemerintah, sistem komunikasi intra Pemerintah Daerah dan persandian untuk pengamanan informasi;
- j. mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas sesuai dengan prosedur dan ketentuan perundang-undangan sebagai bahan pertimbangan bagi pimpinan; dan

- k. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan baik lisa maupun tertulis sesuai dengan tugas dan fungsi serta ketentuan perundang-undangan.

5. Bidang Tata Kelola *E-Government* dan Statistik

Bidang tata kelola *E-Government* dan statistik mempunyai tugas penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penysusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang tata kelola *E-Government* dan statistik. Dalam melaksanakan tugasnya, bidang tata kelola *E-Government* dan statistik memiliki fungsi :

- a. merencanakan program kerja bidang tata kelola *e-government* dan statistik berdasarkan ketentuan perundang-undangan;
- b. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan fungsi dan tanggung jawabnya;
- c. memberi petunjuk dan menyelia pekerjaan bawahan sesuai dengan fungsi dan tanggung jawabnya;
- d. memeriksa hasil pekerjaan bawahan berdasarkan hasil kerja untuk mengetahui adanya kesalahan atau kekeliruan serta upaya penyempurnaannya;
- e. mengoordinasikan penyiapan penyusunan kebijakan dibidang tata kelola *e-government* dan statistik berdasarkan prosedur dan kebijakan yang berlaku agar tugas terlaksana dengan baik;
- f. penyiapan bahan perumusan kebijakan dibidang tata kelola *e-government* dan statistik;
- g. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan dibidang tata kelola *e-government* dan statistik;
- h. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria penyelenggaraan dibidang tata kelola *e-government* dan statistik;
- i. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi dibidang tata kelola *e-government* dan statistik;
- j. pemantauan, evaluasi dan pelaporan dibidang tata kelola *e-government* dan statistik;

- k. mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas sesuai dengan prosedur dan ketentuan perundang-undangan sebagai bahan pertimbangan bagi pimpinan; dan
- l. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan baik lisan maupun tertulis sesuai dengan tugas dan fungsi serta ketentuan perundang-undangan.

6. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha, rumah tangga, kerja sama, kehumasan, protokol dan ketatalaksanaan serta kepegawaian. Dalam melaksanakan tugasnya, sub bagian umum dan kepegawaian memiliki fungsi :

- a. penyusunan rencana dan anggaran sub bagian umum dan kepegawaian;
- b. pengelolaan urusan rencana kebutuhan dan usulan pengembangan pegawai;
- c. pengelolaan urusan mutasi, tanda jasa, kenaikan pangkat, kenaikan jabatan, pemberhentian dan pensiun pegawai;
- d. pengelolaan urusan tata usaha kepegawaian, disiplin pegawai dan evaluasi kinerja pegawai;
- e. pengelolaan urusan tata usaha dan kearsipan;
- f. pengelolaan urusan rumah tangga, keamanan dan kebersihan;
- g. pengelolaan urusan kerja sama, hubungan masyarakat dan protokol;
- h. pelaksanaan evaluasi kelembagaan dan ketatalaksanaan;
- i. melakukan telaahan dan penyiapan bahan penyusunan peraturan perundang-undangan;
- j. penyusunan rencana kebutuhan barang unit dan rencana pemeliharaan barang unit;
- k. penyiapan bahan administrasi pengadaan, penyaluran, penghapusan dan pemindah tanganan barang milik negara dan milik daerah;
- l. penyusunan laporan dan administrasi penggunaan peralatan dan perlengkapan kantor;
- m. penyiapan bahan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan dan penyelesaian tuntutan ganti kerugian daerah;
- n. penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan su bagian umum dan kepegawaian; dan
- o. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan.

7. Seksi Persandian

Seksi persandian mempunyai tugas menyiapkan bahan dan melaksanakan pelayanan di bidang persandian. Dalam melaksanakan tugasnya, seksi persandian mempunyai fungsi :

- a. merencanakan program kerja seksi persandian berdasarkan ketentuan perundang-undangan;
- b. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan fungsi dan tanggung jawabnya;
- c. membimbing pelaksanaan tugas bawahan setiap saat sesuai dengan fungsi dan tanggung jawabnya;
- d. memeriksa hasil pekerjaan bawahan berdasarkan hasil kerja untuk mengetahui adanya kesalahan atau kekeliruan serta upaya penyempurnaannya;
- e. melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan keamanan informasi dilingkungan pemerintah daerah berdasar prosedur dan ketentuan perundang-undangan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas yang meliputi rencana induk keamanan informasi dan peraturan perundang-undangan tentang keamanan informasi dalam lingkup Pemerintah Daerah;
- f. penyusunan peraturan teknis tata kelola keamanan informasi yang meliputi pengelolaan informasi berklasifikasi, pengelolaan sumber daya manusia, pengelolaan perangkat lunak persandian, pengelolaan perangkat keras persandian dan pengelolaan jaringan komunikasi sandi;
- g. penyusunan peraturan teknis operasional penerapan keamanan informasi;
- h. melakukan analisis kebutuhan dalam rangka pengelolaan sumber daya keamanan informasi untuk menjamin ketersediaan dan optimalisasi pemanfaatannya sesuai ketentuan perundang-undangan;
- i. menyelenggarakan pengelolaan layanan keamanan informasi baik elektronik maupun non elektronik berdasarkan asas resiko sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- j. memberikan layanan keamanan informasi sesuai kemampuan dengan terus meningkatkan kapasitas dan kualitas layanan keamanan informasi kepada pengguna layanan dilingkungan Pemerintah Daerah;
- k. melakukan penilaian penerapan keamanan informasi sesuai peraturan perundang-undangan;

- l. melakukan analisis, perancangan dan penetapan pola hubungan komunikasi sandi antar Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah;
- m. melakukan pengamanan terhadap kegiatan aset/fasilitas/instalasi penting/vital/kritis melalui kontra penginderaan dan/ atau metode pengamanan persandian lainnya;
- n. mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan jabatan fungsional sandiman;
- o. mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas sesuai dengan prosedur dan ketentuan perundang-undangan sebagai bahan pertimbangan bagi pimpinan; dan
- p. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan baik lisan maupun tertulis sesuai dengan tugas dan fungsi serta ketentuan perundang-undangan.

8. Seksi Statistik

Seksi Statistik mempunyai tugas menyiapkan bahan dan melaksanakan pelayanan di bidang statistik sektoral. Dalam melaksanakan tugasnya, seksi statistik mempunyai fungsi :

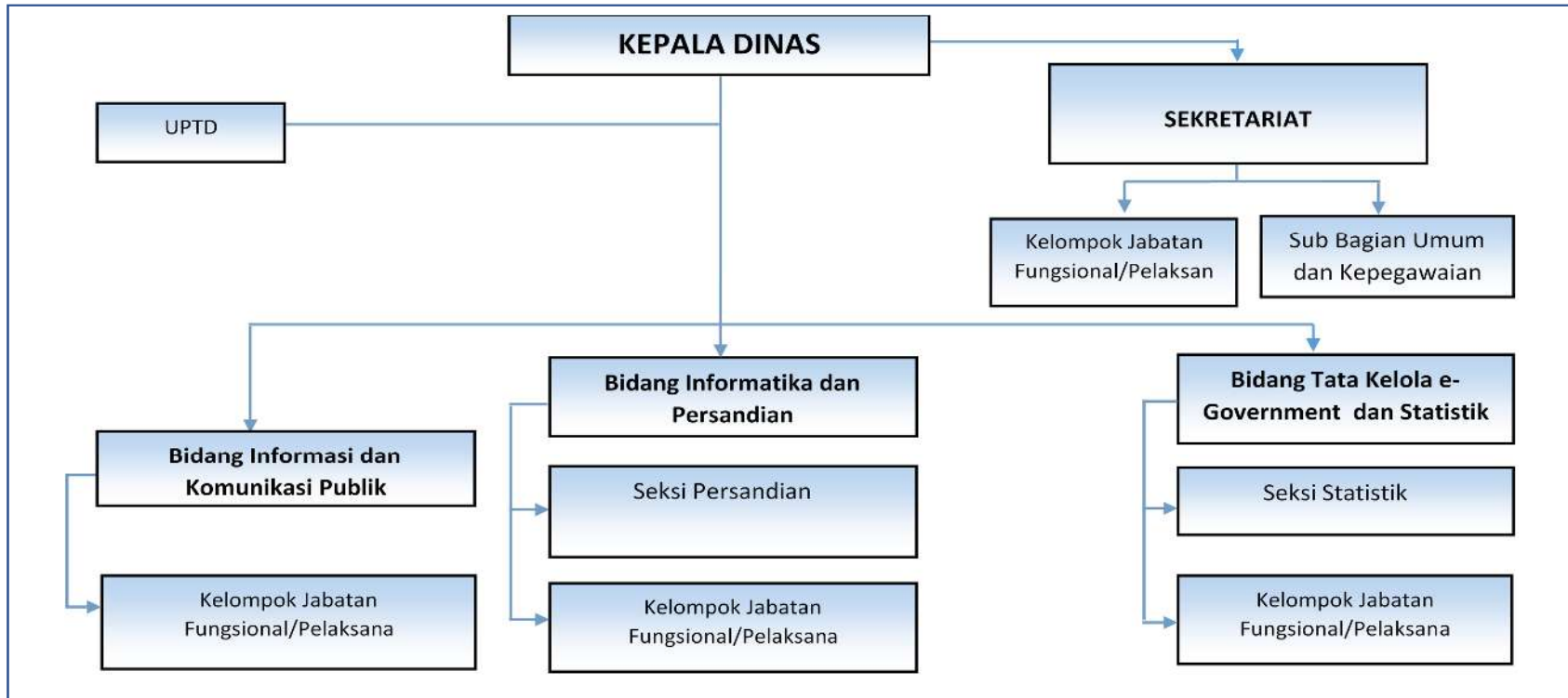
- a. merencanakan program kerja seksi statistik berdasarkan ketentuan perundang-undangan;
- b. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan fungsi dan tanggung jawabnya;
- c. membimbing pelaksanaan tugas bawahan setiap saat sesuai dengan fungsi dan tanggung jawabnya;
- d. memeriksa hasil pekerjaan bawahan berdasarkan hasil kerja untuk mengetahui adanya kesalahan atau kekeliruan serta upaya penyempurnaannya;
- e. melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis dibidang statistik sektoral berdasarkan ketentuan perundang-undangan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- f. pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan evaluasi dan pelaporan terkait fungsi dan layanan statistik sektoral;
- g. melaksanakan pengelolaan data, dokumen dan informasi elektronik dalam penyelenggaraan pemerintahan berbasis elektronik;
- h. mengoordinasikan pengembangan dan penerapan satu data pemerintah daerahsesuai dengan ketentuan perundang-undangan untuk menjamin

terwujudnya data yang akurat, mutakhir, terintegrasi dan dapat diakses sebagai dasar perencanaan, pelaksanaan, pengambilan keputusan, evaluasi dan pengendalian pembangunan daerah;

- i. melakukan koordinasi dan kerja sama dengan pemerintah daerah dan instansi pemerintah lainnya terkait fungsi layanan secara statistik sektoral;
- j. mengevaluasi pelaksanaan tugas dengan cara menginventarisasikan pelaksanaan tugas dan masalah-masalah yang ada untuk perbaikan kinerja dan pemecahan masalah;
- k. mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas sesuai dengan prosedur dan ketentuan perundang-undangan sebagai bahan pertimbangan bagi pimpinan; dan
- l. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan baik lisan maupun tertulis sesuai dengan tugas dan fungsi serta ketentuan perundang-undangan.

STRUKTUR ORGANISASI DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA SOLOK

(Berdasarkan Peraturan Walikota Nomor 28 Tahun 2023)



Sumber Data : Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota Solok

BAB III
PROGRAM, CAPAIAN DAN INOVASI

A. Program Dinas Komunikasi dan Informatika

Program pada Dinas Komunikasi dan Informatika merupakan kerangka kerja strategis yang dirancang untuk mencapai tujuan pembangunan sektor komunikasi, informatika, persandian, dan statistik sektoral. Program ini menjadi acuan dalam penyusunan rencana kerja tahunan serta pedoman pelaksanaan kegiatan operasional yang mendukung pelayanan publik di bidang teknologi informasi dan komunikasi (TIK).

Program yang disusun tidak hanya mendukung internal pemerintah, tetapi juga memberikan kontribusi signifikan kepada masyarakat melalui penyediaan informasi yang mudah diakses, peningkatan literasi digital, dan pelayanan aduan publik berbasis teknologi. Melalui pelaksanaan program yang terarah, Diskominfo berkomitmen untuk memberikan nilai tambah bagi pembangunan daerah. Setiap program diproyeksikan memberi manfaat nyata, baik dalam efisiensi layanan maupun peningkatan kualitas interaksi pemerintah dengan masyarakat. Tabel 3.1 berikut dapat dilihat Program yang terdapat pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Solok.

Tabel 3.1
Program Dinas Komunikasi dan Informatika

PROGRAM	INDIKATOR OUTCOME
<i>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA</i>	
<i>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</i>	
Meningkatnya fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah	Persentase fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah (%)
Meningkatnya kualitas perencanaan, pengukuran, pelaporan dan evaluasi internal Perangkat Daerah	Nilai Komponen Evaluasi Internal SAKIP PD (Angka)
	Nilai Komponen Pelaporan Kinerja SAKIP PD (Angka)
	Nilai Komponen Pengukuran Kinerja SAKIP PD (Angka)
	Nilai Komponen Perencanaan Kinerja SAKIP PD (Angka)

PROGRAM	INDIKATOR OUTCOME
<i>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA</i>	
<i>PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK</i>	
Meningkatnya jangkauan dan kualitas komunikasi publik pemerintah daerah	Persentase tingkat kepuasan masyarakat terhadap akses dan kualitas informasi publik pemerintah daerah (%)
<i>PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA</i>	
Meningkatnya implementasi Pemerintah Digital	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) / Indeks Pemerintah Digital (Pemdi) (Indeks)
<i>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK</i>	
<i>PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL</i>	
Tercapainya kolaborasi, integrasi, dan standarisasi dalam penyelenggaraan Sistem Statistik Nasional (SSN)	Indeks Pembangunan Statistik (IPS) (Poin)
<i>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN</i>	
<i>PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI</i>	
Meningkatnya keamanan siber dan sandi lingkungan pemerintah daerah	Tingkat Kesiapan Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah (%)

B. Kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika

Kegiatan merupakan penjabaran lebih spesifik secara teknis dan administratif dari program Dinas Komunikasi dan Informatika yang menjadi instrumen penting untuk mewujudkan capaian program berhasil dicapai secara terukur.

Dengan pelaksanaan kegiatan yang sistematis, Dinas Kominfo dapat memastikan bahwa setiap program memberi manfaat nyata dan dapat diukur keberhasilannya melalui kinerja yang dicapai di setiap kegiatan. Daftar Kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika dapat dilihat pada Tabel 3.2 berikut:

Tabel 3.2
Kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika

PROGRAM	KEGIATAN	RINCIAN KEGIATAN	INDIKATOR OUTPUT
<i>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA</i>			
<i>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</i>			
Meningkatnya fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tertib Administrasi Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tertib Administrasi Keuangan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tertib Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)

PROGRAM	KEGIATAN	RINCIAN KEGIATAN	INDIKATOR OUTPUT	
<i>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA</i>				
<i>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</i>				
Meningkatnya fasilitas pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Barang Milik Daerah	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan barang milik daerah sesuai dengan RKPBM	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)		

PROGRAM	KEGIATAN	RINCIAN KEGIATAN	INDIKATOR OUTPUT
<i>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA</i>			
<i>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</i>			
Meningkatnya fasilitas pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan barang milik daerah sesuai dengan RKPBM	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)
Meningkatnya kualitas perencanaan, pengukuran, pelaporan dan evaluasi internal Perangkat Daerah	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tertib Administrasi Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)
		Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)
		Meningkatnya Pengelolaan Retribusi Daerah	Persentase Tertib Administrasi Pengelolaan Retribusi Daerah (%)

PROGRAM	KEGIATAN	RINCIAN KEGIATAN	INDIKATOR OUTPUT
<i>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA</i>			
<i>PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK</i>			
Meningkatnya jangkauan dan kualitas komunikasi publik pemerintah daerah	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Penyebaran Informasi Publik Kebijakan dan Program Prioritas Pemerintah dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah aktivitas relasi media kepada media yang memenuhi kriteria sebagai berikut: 1. terverifikasi dewan pers, 2. terdaftar di Dinas Kominfo, dan 3. aktif dalam kegiatan relasi media (Laporan)
			Persentase khalayak yang terpapar informasi publik (Persentase)
			Jumlah Konten Informasi Publik (Konten)
			Jumlah media komunikasi publik milik pemerintah daerah yang dikelola maupun pemanfaatan media berbayar sesuai kriteria/juknis (Media)
		Terlaksananya Penyusunan Konten	Jumlah Konten Informasi Publik (Konten)

PROGRAM	KEGIATAN	RINCIAN KEGIATAN	INDIKATOR OUTPUT
<i>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA</i>			
<i>PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA</i>			
Meningkatnya implementasi Pemerintah Digital	Pengelolaan <i>E-government</i> di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Penyelenggaraan Layanan Digital	Jumlah perangkat daerah di pemerintah Kab/Kota yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota (Perangkat Daerah)
			Jumlah aplikasi khusus yang dibangun dan/atau dikembangkan sesuai dengan ketentuan atau regulasi tentang standar teknis dan prosedur pembangunan dan pengembangan aplikasi SPBE (Aplikasi)
			Jumlah laporan Pelaksanaan Kegiatan Fasilitasi Promosi Literasi SPBE dan/atau kolaborasi penyelenggaraan SPBE (Laporan)
			Jumlah laporan pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan Kabupaten/Kota Cerdas (Dokumen)

PROGRAM	KEGIATAN	RINCIAN KEGIATAN	INDIKATOR OUTPUT
<i>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK</i>			
<i>PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL</i>			
Tercapainya kolaborasi, integrasi, dan standardisasi dalam penyelenggaraan Sistem Statistik Nasional (SSN)	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Publikasi data statistik sektoral daerah	Persentase kegiatan statistik sektoral yang hasilnya dapat diakses oleh pengguna data. (%)
<i>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN</i>			
<i>PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI</i>			
Meningkatnya keamanan siber dan sandi lingkungan pemerintah daerah	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Pengamanan informasi pemerintah daerah kabupaten/kota	Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Provinsi Berbasis Elektronik dan Non Elektronik (Laporan)

C. Capaian Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika

Capaian kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika menunjukkan tingkat komitmen tolak ukur keberhasilan pencapaian tujuan strategis pembangunan daerah. Oleh karena itu Indikator Kinerja Utama Dinas Komunikasi dan Informatika untuk 5 tahun sebagaimana berikut ditargetkan naik secara bertahap untuk mendorong percepatan pembangunan digital yang terukur setiap periodenya. Sedangkan dalam aspek yang lebih operasional Indikator Kinerja Kunci merupakan komitmen tolak ukur keberhasilan pencapaian sasaran strategis pembangunan daerah. Capaian kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika tahun 2024 dan

target tahun 2025 sampai 2030 dapat dilihat pada Tabel 3.3 Indikator Kinerja Utama Dinas Komunikasi dan Informatika dan Tabel 3.4 Indikator Kinerja Kunci Dinas Komunikasi dan Informatika

Tabel 3.3

Indikator Kinerja Utama Dinas Komunikasi dan Informatika

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE	TARGET TAHUN						KET
			TAHUN 2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1.	2.16.2.20.2.21.14.0000 - DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA									
2.	Nilai Hasil Monev Keterbukaan Informasi Publik	Poin	68,87	70	72	74	76	78	80	
3.	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) / Indeks Pemerintah Digital (Pemdi)	Indeks	3,75	3,80	1,7	1,8	1,9	2,0	2,1	
4.	Indeks Pembangunan Statistik (IPS)	Poin	2,61	2,61	2,8	2,8	3	3,17	3,2	

Tabel 3.4

Indikator Kinerja Kunci Dinas Komunikasi dan Informatika

NO	INDIKATOR	STATUS	SATUAN	BASELINE	TARGET TAHUN					
				TAHUN 2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)
A	2.16 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA									
1.	Indeks masyarakat digital Indonesia	positif	Indeks	46,26	54,74	55	56	57	61,06	61,06
2.	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis	positif	Indeks	3,75	3,8	1,7	1,8	1,9	2	2,1

NO	INDIKATOR	STATUS	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN					
					2025	2026	2027	2028	2029	2030
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)
	Elektronik (SPBE) / Indeks Pemerintah Digital (Pemdi)									
3.	Nilai Hasil Monev Keterbukaan Informasi Publik	positif	Poin	68,87	70	72	74	76	78	80
4.	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	positif	Angka	73,3	74,8	76,3	77,8	79,3	80,8	82,3
5.	Indeks Kepuasan Masyarakat Perangkat Daerah	positif	Angka	82,65	83	85	85,5	87	88	88,5
6.	Indeks Pelayanan Publik Perangkat Daerah	positif	Indeks	0	4,09	4,1	4,11	4,12	4,13	4,14
7.	Persentase Perangkat Daerah (PD) di tingkat Kabupaten/Kota yang Terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah	positif	%	100	100	100	100	100	100	100
8.	Persentase Perangkat Daerah (PD) dan/atau Unit Pelaksana Teknis Daerah yang Terhubung dengan Akses Internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	positif	%	100	100	100	100	100	100	100
9.	Persentase Perangkat Dearah yang Memanfaatkan Sistem	positif	%	3,23	6,45	7,69	11,54	15,38	19,23	23,08

NO	INDIKATOR	STATUS	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN					
					2025	2026	2027	2028	2029	2030
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)
	Penghubung Layanan Pemerintah Daerah (SPLPD)									
<i>B. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK</i>										
10.	Indeks Pembangunan Statistik (IPS)	positif	Poin	2,61	2,61	2,8	2,8	3	3,17	3,2
<i>C. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN</i>										
11.	Tingkat Kesiapan Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah	positif	%	55,01	55,01	60,02	62,96	65,03	66,99	70,04

Dalam urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika beberapa indikator yang menjadi kunci utama kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika merupakan instrumen utama dalam memastikan keberhasilan transformasi digital dan tata kelola komunikasi informatika di daerah.

Indeks masyarakat digital Indonesia merupakan target indikator yang dilihat pada pencapaian peningkatan literasi dan kemampuan masyarakat dalam menggunakan teknologi digital baik sehingga mendorong kesiapan masyarakat digital dalam mendukung peranan pemerintah menyediakan layanan digital yang inklusif.

Indeks SPBE atau Indeks Pemerintah Digital (Pemdi) menggambarkan tingkat kematangan tata kelola pemerintahan berbasis digital, meliputi aspek kebijakan, tata kelola, layanan elektronik, infrastruktur, keamanan informasi, serta manajemen data. Indikator ini mencerminkan kesiapan Dinas Komunikasi dan informatika mendukung kinerja Pemerintah Daerah yang efektif, efisien, dan adaptif terhadap pemanfaatan teknologi.

Monev keterbukaan informasi publik mencerminkan kepatuhan Dinas Komunikasi dan Informatika dalam keterbukaan informasi yakni dalam menyediakan layanan informasi yang transparan dan responsif.

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) menunjukkan tingkat efektifitas perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kinerja dalam mencapai kinerja berorientasi hasil, efektif dan efisien dalam penganggaran.

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah penting karena menjadi tolok ukur persepsi publik terhadap kualitas pelayanan pemerintah serta menjadi dasar untuk peningkatan layanan.

Persentase Perangkat Daerah (PD) di tingkat Kabupaten/Kota yang terhubung dengan jaringan intra Pemerintah Daerah menunjukkan proporsi perangkat daerah yang telah terhubung ke jaringan intranet resmi pemerintah daerah, yang menjadi backbone komunikasi data antar-OPD. Indikator ini menunjukkan komitmen integrasi data, keamanan komunikasi, serta efisiensi kerja antar perangkat daerah sudah berjalan baik melalui satu jaringan terstandar yang dikelola oleh Dinas Komunikasi dan Informatika.

Persentase Perangkat Daerah (PD) dan/atau Unit Pelaksana Teknis Daerah yang Terhubung dengan Akses Internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo menunjukkan seberapa merata dan efektif dukungan infrastruktur digital yang diberikan Diskominfo untuk menunjang kegiatan pemerintahan, pelayanan publik, dan sistem informasi internal.

Persentase Perangkat Daerah yang Memanfaatkan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah (SPLPD) menilai tingkat pemanfaatan, yaitu platform integrasi antar layanan digital pemerintah daerah, sehingga data antar sistem dapat saling terhubung dan dikonsumsi secara aman serta terstandar.

Dalam urusan pemerintahan bidang statistik, Indeks Pembangunan Statistik (IPS) menggambarkan tingkat kematangan penyelenggaraan statistik sektoral baik dari sisi kelembagaan, perencanaan data, pengumpulan, pengeloaan dan analisis, diseminasi data, hingga pemanfaatan data dalam pengambilan keputusan yang akurat relevan dan berbasis bukti.

Sedangkan dalam urusan pemerintahan di bidang persandian, tingkat kesiapan pengamanan informasi Pemerintah Daerah merupakan indikator yang menggambarkan kemampuan Dinas Komunikasi dan Informatika dalam melaksanakan pengamanan informasi, mulai dari penerapan kebijakan dan regulasi, tata kelola dan kelembagaan pengaman informasi,

manajemen risiko, pengaamanan teknologi dan infrastruktur, kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) terkait, serta pemantauan, audit dan penanganan insiden yang terjadi secara responsif.

D. Inovasi Dinas Komunikasi dan Informatika

Dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan dan mendukung transformasi digital daerah, Dinas Kominfo Kota Solok melakukan sejumlah inovasi, antara lain:

1. Inovasi Layanan Digital
 - a. Pengembangan aplikasi layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik, seperti sistem perizinan, pengelolaan surat, dan manajemen dokumen digital.
 - b. Pusat Data Terpadu, yang mendukung interoperabilitas data dan layanan antar-OPD.
 - c. Dashboard Monitoring SPBE, sebagai alat kendali kinerja digital pemerintah daerah.
2. Inovasi Komunikasi Publik
 - a. Laport On The Street, program jemput bola Dinas Kominfo langsung ke masyarakat yang melaporkan permasalahan terhadap pembangunan yang berlangsung di Kota Solok.
 - b. Konten Kreatif Kominfo, berupa video informasi publik, infografis, publikasi media, dan kampanye literasi digital.
 - c. Penguatan kanal komunikasi digital, termasuk website, media sosial, dan layanan informasi real-time.
3. Inovasi Keamanan Informasi
 - a. Implementasi sistem pengamanan persandian dan manajemen insiden siber.
 - b. Penerapan kebijakan keamanan informasi berbasis standar nasional.
 - c. Pengembangan prosedur penanggulangan insiden keamanan TIK.
4. Inovasi Statistik Sektoral
 - a. Portal Satu Data Kota Solok untuk menyediakan data sektoral yang valid, akurat, dan mudah diakses.
 - b. Infografis data sektoral yang dirancang komunikatif sebagai bahan informasi publik.
 - c. Penguatan peran Walidata dan Forum Satu Data sebagai wadah koordinasi lintas perangkat daerah.

E. Dampak dan Manfaat Program serta Inovasi

Melalui pelaksanaan program dan inovasi tersebut, sejumlah manfaat dapat dirasakan, di antaranya:

1. Meningkatnya kualitas layanan informasi publik;
2. Tersedianya infrastruktur TIK yang lebih andal, aman, dan terintegrasi;
3. Meningkatnya efisiensi dan efektivitas proses administrasi pemerintahan;
4. Penguatan dasar pengambilan keputusan berbasis data;
5. Terwujudnya budaya digital dan keterbukaan informasi di lingkungan pemerintah daerah.

BAB IV
DATA SEKTORAL DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

A. Gambaran Umum Data Sektoral yang dihasilkan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika

Data sektoral yang dihasilkan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika mencakup urusan komunikasi, informatika, persandian, dan statistik, yang dikumpulkan, diolah, dan disajikan untuk mendukung perencanaan, pelaksanaan, serta evaluasi pembangunan daerah.

B. Jenis dan Daftar Data Sektoral

1. Sumber Daya Manusia

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Solok didukung oleh sumber daya manusia yang terdiri dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebanyak 34 (tiga puluh empat) orang. Komposisi tersebut meliputi 8 (delapan) orang pejabat struktural, 18 (delapan belas) orang pejabat fungsional, dan 8 (delapan) orang pelaksana.

Selain itu, terdapat Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), pegawai paruh waktu, tenaga ahli, dan tenaga sukarela yang turut mendukung pelaksanaan tugas. Secara keseluruhan, jumlah sumber daya manusia pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Solok per 1 November 2025 adalah sebanyak 54 (lima puluh empat) orang. Rincian jumlah sumber daya manusia tersebut dapat dilihat pada Tabel 4.1 Sumber Daya Manusia Dinas Komunikasi dan Informatika, Tabel 4.2 Jumlah PNS Berdasarkan Pangkat, Tabel 4.2 Jumlah SDM Berdasarkan Pendidikan, dan Tabel 4.4 Jumlah SDM Berdasarkan Jabatan

Tabel 4.1 Sumber Daya Manusia Dinas Komunikasi dan Informatika

No	Jenis kepegawaian	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki-Laki	Perempuan	
1	PNS	25	9	34
2	PPP	2	0	2
3	PPP Paruh Waktu	8	5	13
4	Tenaga Ahli	2	2	4
5	Pegawai Sukarela	0	1	1
		37	17	54

Sumber : Sekretariat Dinas Komunikasi dan Informatika

Tabel 4.2 Jumlah PNS Berdasarkan Pangkat

Jenjang Kepangkatan	Jumlah		Total
	Laki-Laki	Perempuan	
IVc	1	0	1
IVa	3	1	4
IIIId	8	4	12
IIIc	3	2	5
IIIb	1	0	1
IIIa	7	2	9
IIc	2	0	2
JUMLAH	25	9	34

Sumber : Sekretariat Dinas Komunikasi dan Informatika

Tabel 4.3 Jumlah SDM Berdasarkan Pendidikan

Tingkat Pendidikan	Jumlah		Total
	Laki-Laki	Perempuan	
S2	13	4	17
S1	15	8	23
D3	4	2	6
SMA	4	2	6
SMP	1	1	2
JUMALH	37	17	

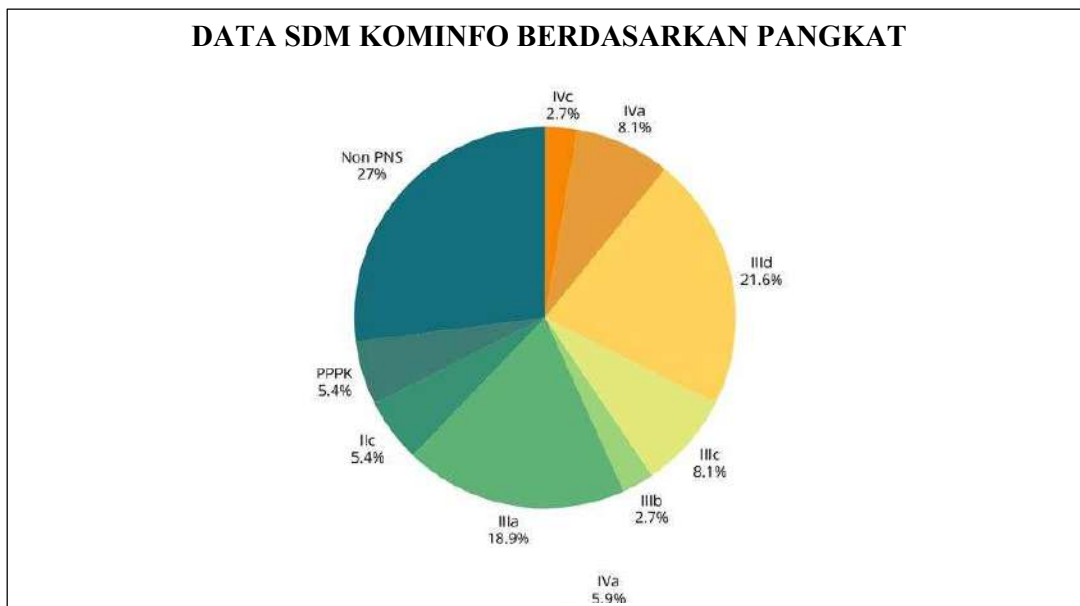
Sumber : Sekretariat Dinas Komunikasi dan Informatika

Tabel 4.4 Jumlah SDM Berdasarkan Jabatan

Kelompok Jabatan	Jumlah		Total
	Laki-Laki	Perempuan	
Kepala Dinas	1	0	1
Sekretaris	1	0	1
Kepala Bidang	3	0	3
Kasubag Umum	0	1	1

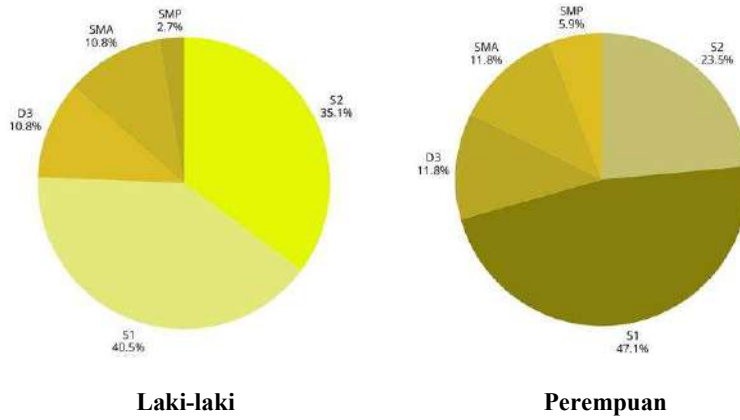
Kelompok Jabatan	Jumlah		Total
	Laki-Laki	Perempuan	
Kepala Seksi	1	1	2
Perencana Ahli Muda	1	0	1
Pranata Komputer Ahli Muda	2	2	4
Pranata Humas Ahli Muda	1	1	2
Prahata Komputer Ahli Pertama	6	1	7
Pranata Humas Ahli Pertama	3	0	3
Pranata Komputer Terampil	2	0	2
Penelaah Teknis Kebijakan	1	3	4
Pengolah Data dan Informasi	2	0	2
Penata Layanan Operasional	2	0	2
Pengadministrasi Perkantoran	1	0	1
Pegawai Paruh Waktu	8	5	13
Tenaga Ahli	2	2	4
Tenaga Sukarela	0	1	1
JUMLAH			54

Sumber : Sekretariat Dinas Komunikasi dan Informatika



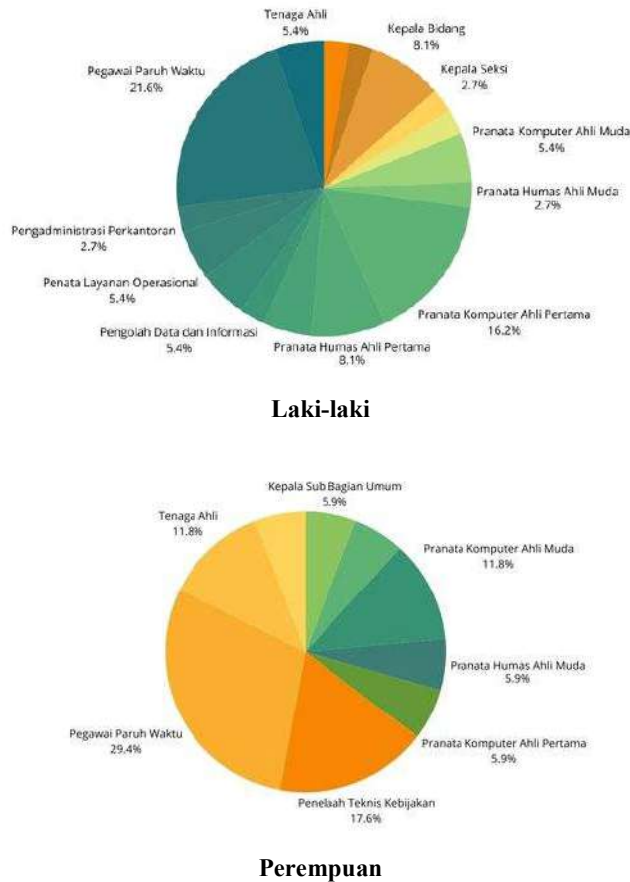
Gambar 4.1 Grafik SDM Berdasarkan Pangkat

DATA SDM KOMINFO BERDASARKAN PENDIDIKAN



Gambar 4.2 Grafik SDM Berdasarkan Pendidikan

DATA SDM KOMINFO BERDASARKAN JABATAN



Gambar 4.3 Grafik SDM Berdasarkan Jabatan

Sumber Data : Sekretariat Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Solok

2. Kompilasi Data Sektoral dari Bidang

Kompilasi Data Sektoral dari Bidang adalah proses penghimpunan, pengolahan, dan penyajian data yang berasal dari masing-masing bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya. Data tersebut mencerminkan capaian kinerja, pelaksanaan program dan kegiatan, serta informasi strategis lainnya yang digunakan sebagai dasar dalam perencanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan. Melalui kompilasi ini, diharapkan tersedianya data yang akurat, mutakhir, dan terintegrasi untuk mendukung pengambilan keputusan yang efektif dan berbasis data. Tabel 4.5 berikut menyajikan kompilasi data sektoral yang dihimpun dari masing-masing bidang.

Tabel 4.5

Kompilasi data sektoral yang dihimpun dari masing-masing bidang

No	Nama Data	Definisi	Satuan	Sumber	Frekuensi
1	Jumlah Website OPD Aktif	Jumlah website resmi OPD yang aktif, dapat diakses, dan dikelola secara berkala	unit	Bidang IP	Tahunan
2	Jumlah Layanan Publik dan Pemerintah	Jumlah keseluruhan layanan publik dan layanan pemerintahan yang tersedia pada OPD	unit	Bidang IP	Tahunan
3	Jumlah Pengaduan Masyarakat	Jumlah pengaduan masyarakat yang masuk dan diproses melalui sistem pengelolaan pengaduan	aduan	SP4N-LAPOR/ Bidang IKP	Tahunan
4	Daerah Blankspot	Wilayah yang belum terjangkau jaringan telekomunikasi atau internet	lokasi	Bidang IP	Tahunan
5	Daftar Email OPD	Daftar alamat email resmi yang digunakan oleh masing-masing OPD	unit	Bidang IP	Tahunan

No	Nama Data	Definisi	Satuan	Sumber	Frekuensi
6	Jumlah Media Online	Jumlah media online yang aktif mempublikasikan informasi terkait daerah	unit	Bidang IKP	Tahunan
7	Jumlah Berita Kota Solok yang Dipublikasikan	Jumlah berita atau informasi tentang Kota Solok yang dipublikasikan melalui media resmi maupun media massa	berita	Bidang IKP	Tahunan
8	Jumlah OPD dan UPTD yang Terhubung dengan Jaringan Solokkota	Jumlah OPD dan UPTD yang telah terkoneksi dengan jaringan pemerintah daerah	unit	Bidang IP	Tahunan
9	Jumlah Data Sektoral yang Terpublikasi	Jumlah data sektoral yang dihasilkan OPD dan dipublikasikan melalui portal data	dataset	Bidang TKES	Tahunan
10	Persentase Perangkat Daerah yang Menggunakan Statistik Dasar dan Statistik Sektoral	Persentase OPD yang memanfaatkan data statistik dalam perencanaan, monitoring, dan evaluasi pembangunan	persen (%)	Bidang TKES	Tahunan
11	Indeks SPBE	Nilai indeks yang menggambarkan tingkat kematangan penerapan SPBE	indeks	Bidang TKES	Tahunan

No	Nama Data	Definisi	Satuan	Sumber	Frekuensi
12	Indeks IMDI	Indeks yang mengukur tingkat literasi dan pemanfaatan teknologi digital masyarakat	indeks	Bidang IP	Tahunan
13	IPS	Indeks Pembangunan Statistik yang mengukur kematangan penyelenggaraan statistik sektoral	indeks	Bidang TKES	Tahunan
14	Tingkat Keamanan Informasi	Tingkat kematangan penerapan keamanan informasi pada sistem pemerintah daerah	indeks	Bidang IKP	Tahunan
15	Indeks Keterbukaan Informasi Publik	Nilai indeks yang mengukur tingkat keterbukaan informasi badan publik	indeks	Bidang IKP	Tahunan
16	Jumlah Langganan Media	Jumlah kerja sama atau langganan media massa oleh pemerintah daerah	unit	Bidang IKP	Tahunan
17	Sebaran CCTV	Jumlah dan lokasi pemasangan CCTV untuk pemantauan wilayah	unit/ lokasi	Bidang TKES	Tahunan

C. Capaian Realisasi Data Sektoral

Capaian realisasi data sektoral merupakan gambaran tingkat ketersediaan dan pemenuhan data yang dihasilkan oleh masing-masing bidang sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Realisasi ini mencerminkan komitmen perangkat daerah dalam menyediakan data yang akurat, mutakhir, dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai dasar perencanaan, pelaksanaan, serta evaluasi pembangunan.

Seiring dengan peningkatan tata kelola data, capaian realisasi data sektoral juga menunjukkan adanya perbaikan dalam aspek kualitas, kelengkapan, dan keterpaduan data antar bidang. Hal ini mendukung terwujudnya sistem Satu Data yang efektif, sehingga pengambilan kebijakan dapat dilakukan secara lebih tepat, terukur, dan berbasis data.

1. Bidang Informatika dan Persandian

Capaian realisasi data sektoral pada bidang Informatika dan Persandian diantaranya: Jumlah website OPD aktif, Jumlah layanan publik, Jumlah layanan pemerintah, Jumlah layanan pemerintah, Jumlah OPD dan UPTD yang terhubung dengan jaringan solokkota, Daerah Blankspot di Kota Solok, Data E-Mail resmi OPD, Jumlah Sub Domain, Tingkat Keamanan Informasi Pemerintah (indeks KAMI). Tabel 4.6 berikut menggambarkan capaian realisasi data sektoral pada bidang Informatika dan Persandian tahun 2024 dan 2025.

Tabel 4.6

Capaian Realisasi Data Sektoral pada bidang Informatika dan Persandian

No	Data	Realisasi Data Sektoral	
		Tahun 2024	Tahun 2025
1	Jumlah website OPD aktif	57	52
2	Jumlah layanan publik	27	44
3	Jumlah layanan pemerintah	37	28
4	Jumlah OPD dan UPTD yang terhubung dengan jaringan solokkota	64	62
5	Daerah Blankspot di Kota Solok	0	0
6	Data E-Mail resmi OPD	44	44
7	Jumlah Sub Domain	140	148
8	Tingkat Keamanan Informasi Pemerintah (indeks KAMI)	2 +	2 +

Pada tahun 2025, jumlah website resmi OPD yang aktif mengalami penurunan dari 57 unit pada tahun 2024 menjadi 52 unit. Penurunan sebanyak 5 website tersebut disebabkan oleh penonaktifan berdasarkan hasil analisis kebutuhan oleh masing-masing OPD yang menyatakan bahwa website tersebut tidak lagi diperlukan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 4.7.

Tabel 4.7

Daftar Website Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kota Solok
yang Dibangun/Dikembangkan Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2025

No	Instansi Pengelola	Aplikasi	Nama Aplikasi	Alamat Web	Status
1	Dinas Kesehatan	Website Puskesmas Nan Balimo Kota Solok	Website Puskesmas Nan Balimo Kota Solok	https://puskesmas-nanbalimo.solokkota.go.id/	Aktif
2	Puskesmas Tanjung Paku	Website Puskesmas Tanjung Paku Kota Solok	Website Puskesmas Tanjung Paku Kota Solok	https://puskesmas-tjpaku.solokkota.go.id/	Aktif
3	Puskesmas Tanah Garam	Website Puskesmas Tanah Garam Kota Solok	Website Puskesmas Tanah Garam Kota Solok	https://puskesmas-tanahgaram.solokkota.go.id/	Aktif
4	Dinas Komunikasi dan Informatika	Website Masjid Agung	Website Masjid Agung	https://masjidagung.solokkota.go.id/	Tidak Aktif
5	Dinas Komunikasi dan Informatika	Website Dinas Kominfo Kota Solok	Website Dinas Kominfo Kota Solok	https://kominfo.solokkota.go.id/	Aktif
6	Dinas Pariwisata	Website Dinas Pariwisata	Website Dinas Pariwisata	https://dispar.solokkota.go.id/	Aktif
7	Kelurahan Tanah Garam	Website Kelurahan Tanah Garam	Website Kelurahan Tanah Garam	https://tanahgaram.solokkota.go.id/	Aktif
8	Kelurahan VI Suku	Website Kelurahan VI Suku	Website Kelurahan VI Suku	https://enamsuku.solokkota.go.id/	Aktif
9	Kelurahan Sinapa Piliang	Website Kelurahan Sinapa Piliang	Website Kelurahan Sinapa Piliang	https://sinapapiliang.solokkota.go.id/	Aktif

No	Instansi Pengelola	Aplikasi	Nama Aplikasi	Alamat Web	Status
10	Kelurahan Kampai Tabu Karambia	Website Kelurahan Kampai Tabu Karambia	Website Kelurahan Kampai Tabu Karambia	https://ktk.solokkota.go.id /	Aktif
11	Kelurahan Aro IV Korong	Website Kelurahan Aro IV Korong	Website Kelurahan Aro IV Korong	https://aro4kr.solokkota.go.id/	Aktif
12	Kelurahan Simpang Rumbio	Website Kelurahan Simpang Rumbio	Website Kelurahan Simpang Rumbio	https://simpangrumbio.solokkota.go.id/	Aktif
13	Dinas Pendidikan	Website Dinas Pendidikan	Website Dinas Pendidikan	https://disdik.solokkota.go.id/	Aktif
14	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Website Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Website Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	https://dispupip.solokkota.go.id/	Aktif
15	Dinas Perdagangan dan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	Website Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM	Website Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM	https://dpkukm.solokkota.go.id/	Aktif
16	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Website Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Website Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	https://dpupr.solokkota.go.id/	Aktif
17	Badan Keuangan Daerah	Website Badan Keuangan Daerah	Website Badan Keuangan Daerah	https://bkd.solokkota.go.id/	Aktif
18	Inspektorat Daerah	Website Inspektorat Daerah	Website Inspektorat Daerah	https://inspektorat.solokkota.go.id/	Aktif

No	Instansi Pengelola	Aplikasi	Nama Aplikasi	Alamat Web	Status
19	Dinas Sosial	Website Dinas Sosial	Website Dinas Sosial	https://dinsos.solokkota.go.id/	Aktif
20	Dinas Perhubungan	Website Dinas Perhubungan	Website Dinas Perhubungan	https://dishub.solokkota.go.id/	Aktif
21	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	Website Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	Website Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	https://kesbangpol.solokkota.go.id/	Aktif
22	Kecamatan Tanjung Harapan	Website Kec. Tanjung Harapan	Website Kec. Tanjung Harapan	http://tanjungharapan.solokkota.go.id/	Aktif
23	Dinas Perumahan dan kawasan permukiman	Website Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	Website Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	https://perkim.solokkota.go.id/	Aktif
24	Kelurahan Nan Balimo	Website Kelurahan Nan Balimo	Website Kelurahan Nan Balimo	https://nanbalimo.solokkota.go.id/	Aktif
25	Kelurahan Pasar Pandan Air Mati	Website Kelurahan Pasar Pandan Air Mati	Website Kelurahan PPA	https://ppa.solokkota.go.id/	Aktif
26	Kelurahan Koto Panjang	Website Kelurahan Koto Panjang	Website Kelurahan Koto Panjang	https://kotopanjang.solokkota.go.id/	Aktif
27	Kelurahan Kampung Jawa	Website Kelurahan Kampung Jawa	Website Kelurahan Kampung Jawa	https://kampungjawa.solokkota.go.id/	Aktif
28	Kelurahan Laing	Website Kelurahan Laing	Website Kelurahan Laing	https://laing.solokkota.go.id/	Aktif

No	Instansi Pengelola	Aplikasi	Nama Aplikasi	Alamat Web	Status
29	Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	Website Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Website Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	https://dppkb.solokkota.go.id/	Aktif
30	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	Website Sekretariat DPRD	Website Sekretariat DPRD	https://dprd.solokkota.go.id/	Aktif
31	Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan	Website Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	Website Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	https://damkar.solokkota.go.id/	Aktif
32	Kwarcab Pramuka Kota Solok	Website Kwartir Cabang Gerakan Pramuka Kota Solok	Website Kwartir Cabang Gerakan Pramuka Kota Solok	https://kwarcab.solokkota.go.id/	Aktif
33	Kejaksaan Negeri	Website Kejaksaan Negeri Solok	Website Kejaksaan Negeri Solok	https://leis.solokkota.go.id/	Aktif
34	Kecamatan Lubuk Sikarah	Website Kec. Lubuk Sikarah	Website Kec. Lubuk Sikarah	http://lubuksikarah.solokkota.go.id/	Aktif
35	Dinas Komunikasi Dan Informatika	Website Resmi Pemerintah Kota Solok	Website Resmi Pemerintah Kota Solok	https://solokkota.go.id/	Aktif
36	Dinas Pariwisata	Website event Rang Solok Baralek Gadang	Website event Rang Solok Baralek Gadang	https://baralekgadang.solokkota.go.id/	Aktif

No	Instansi Pengelola	Aplikasi	Nama Aplikasi	Alamat Web	Status
37	Dinas Kesehatan	Website Dinas Kesehatan	Website Dinas Kesehatan	http://dinkes.solokkota.go.id/	Aktif
38	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Website BKPSDM	Website BKPSDM	http://bkpsdm.solokkota.go.id/	Aktif
39	Dinas Pertanian	Website Dinas Pertanian	Website Dinas Pertanian	https://disperta.solokkota.go.id/	Aktif
40	Badan Penelitian Dan Pengembangan	Website resmi Balitbang	Website resmi Balitbang	https://balitbang.solokkota.go.id	Aktif
41	Dinas Pemuda Dan Olahraga	Website Dinas Pemuda dan Olahraga	Website Dinas Pemuda dan Olahraga	http://dispora.solokkota.go.id/	Aktif
42	Dinas Pangan	Website Dinas Pangan	Website Dinas Pangan	http://dinaspangan.solokkota.go.id/	Aktif
43	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan Dan Perlindungan Anak	Website Dinas PPPA	Website Dinas PPPA	http://dpmppa.solokkota.go.id/	Aktif
44	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Website DPMPTSP	Website DPMPTSP	http://dpmptsp.solokkota.go.id/	Aktif
45	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Website Bappeda	Website Bappeda	http://bappeda.solokkota.go.id/	Aktif

No	Instansi Pengelola	Aplikasi	Nama Aplikasi	Alamat Web	Status
46	Dinas Lingkungan Hidup	Website Dinas Lingkungan Hidup	Website Dinas Lingkungan Hidup	http://dlh-info.solokkota.go.id/	Aktif
47	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Sistem Informasi Pusat pengendalian operasi penanggulangan bencana dan Website BPBD Kota Solok	Website BPBD Kota Solok	https://bpbd.solokkota.go.id	Aktif
48	Puskesmas Ktk	Website Puskesmas KTK	Website Puskesmas KTK	https://puskesmas-ktk.solokkota.go.id/	Aktif
49	Kelurahan Ix Korong	Website Kelurahan IX Korong	Website Kelurahan IX Korong	https://sembilankorong.solokkota.go.id/	Aktif
50	Kelurahan Tanjung Paku	Website Kelurahan Tanjung Paku	Website Kelurahan Tanjung Paku	https://tanjungpaku.solokkota.go.id/	Aktif
51	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	Website Dinas Dukcapil Kota Solok	Website Disdukcapil	http://disdukcapil.solokkota.go.id	Aktif
52	PKK Kota Solok	Website TP PKK Kota Solok	Website TP PKK Kota Solok	http://pkk.solokkota.org/	Aktif

Sumber : Bidang Informatika dan Persandian Diskominfo Kota Solok

Demikian pula pada layanan publik dan layanan pemerintahan, pada tahun 2025 terjadi peningkatan jumlah layanan publik sebanyak 17 layanan yang berasal dari usulan baru OPD. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 4.8 berikut:

Tabel 4.8

Daftar Aplikasi Layanan Publik Pemerintah Kotas Solok
yang Dibangun/Dikembangkan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2025

No.	Instansi Pengelola	Aplikasi	Nama Aplikasi	Alamat Web	Status
1	Dinas Komunikasi Dan Informatika	Website Info Publik Solok	Website Info Publik Solok	https://infopublik.solokkota.go.id/	Aktif
2	Dinas Pendidikan	Sistem Penerimaan Murid Baru SDN dan SMPN Kota Solok Tahun 2025	SPMB Kota Solok 2025	https://spmb.solokkota.go.id/	Aktif
3	Dinas Perdagangan Dan Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah	Aplikasi Promosi dan Pemasaran Produk UMKM Kota Solok	UMKM Manjua	https://umkm-manjua.solokkota.go.id/	Aktif
4	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Sistem Layanan Elektronik Kota Solok	SILEK	https://silek.solokkota.go.id/	Aktif
5	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Website Mall pelayanan Publik kota Solok	MPP Digital	https://mpp.solokkota.go.id/	Aktif
6	Dinas Kesehatan	Aplikasi Antrian OPD Layanan Kota Solok	Aplikasi Antrian	https://antrian.solokkota.go.id/	Aktif

No.	Instansi Pengelola	Aplikasi	Nama Aplikasi	Alamat Web	Status
7	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	Aplikasi Layanan Kepengurusan Dokumen Administrasi Kependudukan secara Online	PALADO (Pelayanan Dokumen Online)	https://palado.solokkota.go.id/	Aktif
8	Bagian Administrasi Pembangunan	Sistem Informasi Manajemen Pembangunan dan Administrasi	SIMPANAN	https://simpanan.solokkota.go.id/	Aktif
9	Bagian Organisasi	Aplikasi Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	Aplikasi Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	https://skm.solokkota.go.id/	Aktif
10	Dinas Komunikasi Dan Informatika	Aplikasi Super Apps Mobile Kota Solok	Aplikasi Super Apps Mobile Kota Solok	Super Apps Mobile Kota Solok	Aktif
11	Dinas Pariwisata	Aplikasi Pendataan Destinasi Wisata berbasis Android	Aplikasi Pendataan Destinasi Wisata berbasis Android	https://play.google.com/store/apps/details?id=id.go.solokkota.pariwisata	Aktif
12	Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman	Layanan Sistem Informasi Rumah Impian Kota Solok	SIRIAN KOTA SOLOK	https://sirian.solokkota.go.id/	Aktif
13	Dinas Komunikasi Dan Informatika	Website PPID Bawaslu dan berbasis Android	Website PPID Bawaslu dan berbasis Android	http://solokkota.bawaslu.go.id/ppid/	Tidak Aktif

No.	Instansi Pengelola	Aplikasi	Nama Aplikasi	Alamat Web	Status
14	Dinas Komunikasi Dan Informatika	Website PPID Kota Solok	Website PPID Kota Solok	http://ppid.solokkota.go.id/ , https://newppid.solokkota.go.id/	Aktif
15	Dinas Komunikasi Dan Informatika	Aplikasi pelayanan administrasi surat menyurat Kelurahan secara online	Aplikasi pelayanan administrasi surat menyurat Kelurahan secara online	https://sakato.solokkota.go.id/	Aktif
16	Kelurahan Vi Suku	Aplikasi Kelurahan VI Suku Android	Aplikasi Kelurahan VI Suku Android	https://enamsuku.solokkota.go.id/	Aktif
17	Dinas Perdagangan Dan Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah	Aplikasi Database Pedagang berbasis Android	Aplikasi Database Pedagang	https://retribusikios.solokkota.go.id/	Aktif
18	Dinas Pemuda Dan Olahraga	Aplikasi Pengolahan Data Kepemudaan Kota Solok	SIPANDA	https://sipanda.solokkota.go.id/	Aktif
19	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan Dan Perlindungan Anak	Sipedas (Sistem Informasi PKK dan Dasawisma Online) Android dan Web	Aplikasi SIPEDAS	1. https://play.google.com/store/apps/details?id=id.go.solokkota.sipedasonline 2. https://sipedasonline.solokkota.go.id/	Aktif

No.	Instansi Pengelola	Aplikasi	Nama Aplikasi	Alamat Web	Status
20	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Sistem Informasi Masyarakat Miskin Kota Solok	SIYakin Kota Solok	https://siyakin.solokkota.go.id/	Aktif
21	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Aplikasi PUSPINA (Pusat Informasi Kebencanaan) berbasis Android	PUSPINA	https://play.google.com/store/apps/details?id=com.kominfo.puspina&hl=en-ID	Aktif
22	Pengadilan Negeri Kota Solok	Aplikasi E-Delevery Penetapan (E-DEPE)	E-DEPE	https://edp.solokkota.go.id/	Aktif
23	Dinas Kesehatan	Aplikasi Kota Solok Tanggap Corona	Aplikasi Kota Solok Tanggap Corona	https://corona.solokkota.go.id/	Tidak Aktif
24	Dinas Pendidikan	Aplikasi Penerimaan Siswa Baru Online Berbasis Zonasi (SiPESONA)	Aplikasi Penerimaan Siswa Baru Online Berbasis Zonasi (SiPESONA)	https://ppdb.solokkota.go.id/	Tidak Aktif
25	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Aplikasi Informasi Bursa Kerja Online (BKOL)	Bursa Kerja Online (BKOL)	http://bkol.solokkota.go.id	Aktif
26	Dinas Komunikasi Dan Informatika	Aplikasi Solok di Ujung Jari	SODIJA	http://info.solokkota.go.id/	Aktif

No.	Instansi Pengelola	Aplikasi	Nama Aplikasi	Alamat Web	Status
27	Dinas Pendidikan	Website Info Publik Sekolah	Website Info Publik Sekolah	http://kabasakola.solokkota.go.id/	Tidak Aktif
28	Bagian Hukum	Website JDIH Kota Solok	Website JDIH Kota Solok	https://jdih.solokkota.go.id/	Aktif

Sumber : Bidang Informatika dan Persandian Diskominfo Kota Solok

Sementara itu, jumlah layanan pemerintahan mengalami penurunan sebanyak 9 layanan sebagai akibat penonaktifan berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi yang menunjukkan bahwa layanan tersebut tidak lagi diperlukan oleh OPD. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dari Tabel 4.9 berikut:

Tabel.4.9

Daftar Aplikasi Layanan Pemerintah Kota Solok yang Dibangun/Dikembangkan Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2025

No.	Instansi Pengelola	Aplikasi	Nama Aplikasi	Alamat Web	Status
1	Dinas Komunikasi Dan Informatika	Sistem Informasi Manajemen Teknologi Informasi dan Komunikasi	SIMANTIK	https://simantik.solokkota.go.id/	Aktif
2	Dinas Pendidikan	Aplikasi Laporan Bulanan Dinas Pendidikan	Laporan Bulanan Dindik	localhost/labbul	Aktif
3	Dinas Perdagangan Dan Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah	Sistem Informasi Terpadu UMKM	SIPANDU	https://sipandu.solokkota.go.id/	Aktif
4	Bagian Organisasi	Aplikasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah secara elektronik	E-SAKIP	https://esakip.solokkota.go.id	Aktif

No.	Instansi Pengelola	Aplikasi	Nama Aplikasi	Alamat Web	Status
5	Dinas Komunikasi Dan Informatika	Aplikasi Satu Data Kota Solok	Aplikasi Satu Data Kota Solok	https://satudata.solokkota.go.id/	Aktif
6	Inspektorat Daerah	Aplikasi Whistle Blowing System Kota Solok	Aplikasi Whistle Blowing System Kota Solok	https://wbs.solokkota.go.id	Aktif
7	Inspektorat Daerah	Sistem Informasi Surat Keterangan Bebas Temuan	SISKEBAT	https://siskebat.solokkota.go.id/	Aktif
8	Dinas Komunikasi Dan Informatika	Aplikasi pendaftaran e- mail pegawai berbasis android dan web	SIMAIL	https://play.google.com/store/apps/details?id=id.go.solokkota.simail&hl=id, https://simail.solokkota.go.id	Aktif
9	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Aplikasi Android KEPO Mobile 2025	KEPO Mobile Kota Solok	https://play.google.com/store/apps/details?id=id.go.solokkota.kepo.mobile	Aktif
10	Dinas Komunikasi Dan Informatika	Sistem Pemesanan Ruang Rapat	SIMESRA	https://simesra.solokkota.go.id/	Aktif
11	Dinas Komunikasi Dan Informatika	Sistem Informasi Tata Naskah Dinas	SINADINE	https://kepo.solokkota.go.id/	Aktif

No.	Instansi Pengelola	Aplikasi	Nama Aplikasi	Alamat Web	Status
12	Dinas Komunikasi Dan Informatika	Dashboard untuk Mengakses Aplikasi e- Government	Dashboard e-Government Monitoring Room	http://dashboard.solokkota.go.id/	Tidak Aktif
13	Dinas Komunikasi Dan Informatika	Dashboard untuk Monitoring Penggunaan Aplikasi	E-Government Monitoring Room Kota Solok	http://emr.solokkota.go.id/	Tidak Aktif
14	Dinas Komunikasi Dan Informatika	Data Master Sistem Penghubung Layanan Pemerintah (SPLP)	Data Master SPLP	http://data.solokkota.go.id/	Aktif
15	Dinas Komunikasi Dan Informatika	Layanan E-mail resmi Pegawai	E-mail Solokkota	https://kepo.solokkota.go.id/	Aktif
16	Dinas Komunikasi Dan Informatika	Layanan Tanda Tangan Elektronik	Layanan TTE	https://kepo.solokkota.go.id/	Aktif
17	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Sistem Informasi Laporan Kerja Harian	LKH	https://kepo.solokkota.go.id	Aktif
18	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Aplikasi Tambahan Tunjangan Penghasilan (TPP) 2025	Aplikasi TPP 2025	https://kepo.solokkota.go.id/	Aktif

No.	Instansi Pengelola	Aplikasi	Nama Aplikasi	Alamat Web	Status
19	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (Aplikasi Kepegawaian Online)	KEPO	https://kepo.solokkota. go.id	Aktif
20	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Aplikasi e- Musrebang/e- Planning	e- Musrebang /e- Planning	http://eplanning.solokkota. ota.go.id/	Tidak Aktif
21	Dinas Komunikasi Dan Informatika	Aplikasi Tambahan Tunjangan Penghasilan (TPP)	Aplikasi TPP	https://kepo.solokkota. go.id/	Aktif
22	Dinas Komunikasi Dan Informatika	Sistem Penghubung Layanan Data API Kota Solok	Sistem Penghubung Layanan Data API Kota Solok	http://api.solokkota.go. id/	Aktif
23	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Aplikasi Cuti	Aplikasi Cuti	https://kepo.solokkota. go.id	Aktif
24	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Aplikasi PRESENSI	Aplikasi PRESENSI	https://presensi.solokkota. ota.go.id/	Aktif

No.	Instansi Pengelola	Aplikasi	Nama Aplikasi	Alamat Web	Status
25	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	KEPO Mobile Kota Solok	KEPO Mobile Kota Solok	LKH Android Kota Solok (lama)	Aktif
26	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	Sanitasi (Sistem Aplikasi Manajemen Infrastruktur Terintegrasi)	Aplikasi GIS PUPR	https://sanitasi.solokkota.go.id/	Aktif
27	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Aplikasi Pergudangan dan Logistik BPBD	Sistem Informasi Logistik dan Pergudangan BPBD (SILOPER)	https://siloperbpd.solokkota.go.id/	Aktif
28	Dinas Komunikasi Dan Informatika	Aplikasi Portal Satu Data (Porsada) Kota Solok	Aplikasi Portal Satu Data Kota Solok	https://porsada.solokkota.go.id/	Aktif
29	Dinas Komunikasi Dan Informatika	Aplikasi P12 (TTE)	Aplikasi P12 (TTE)	https://tte.solokkota.go.id/	Aktif
30	Dinas Pertanian	Aplikasi Sistem Informasi Kelembagaan Tani	Aplikasi Sistem Informasi Kelembagaan Tani	http://sibangtani.solokkota.go.id/	Tidak Aktif

No.	Instansi Pengelola	Aplikasi	Nama Aplikasi	Alamat Web	Status
31	Dinas Lingkungan Hidup	Aplikasi Pangkalan Data Keanekaragaman Hayati Kota Solok	PADATI Kota Solok	http://padati.solokkota. go.id	Tidak Aktif
32	Dinas Komunikasi Dan Informatika	Aplikasi Buku Tamu elektronik	Buku Tamu Elektronik	https://bukutamu.solok kota.go.id/	Aktif
33	Dinas Komunikasi Dan Informatika	Aplikasi Kegiatan	Aplikasi Kegiatan	http://kegiatan.solokko ta.go.id	Aktif
34	Dinas Komunikasi Dan Informatika	Aplikasi Pengaduan dan Pemeliharaan Jaringan Internet Solokkota	Aplikasi Pengaduan dan Pemeliharaan Jaringan Internet Solokkota	https://laporjaringan.so lokkota.go.id	Aktif
35	Dinas Perdagangan Dan Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah	Aplikasi SiTera Online	Aplikasi SiTera Online	http://tera.solokkota.go .id	Aktif
36	Inspektorat Daerah	Aplikasi konsultasi online Pengawasan Inspektorat	Konsultasi Online Pengawasan (KLOP) / Klinik Layanan Online Pengawasan	http://klop.solokkota.g o.id	Aktif

No.	Instansi Pengelola	Aplikasi	Nama Aplikasi	Alamat Web	Status
37	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan Dan Perlindungan Anak	Aplikasi Sistem Informasi Lembaga Keuangan Mikro	Aplikasi Sistem Informasi Lembaga Keuangan Mikro (Aplikasi LKM)	https://lkm.solokkota.go.id/	Tidak Aktif
38	Bagian Perekonomian Dan Sumber Daya Alam	Aplikasi untuk monitoring dan evaluasi Rencana Aksi Pengembangan Agrowisata Kota Solok	SiMERAK	http://simerak.solokkota.go.id	Tidak Aktif
39	Kejaksaan Negeri	Aplikasi Persuratan online Kejaksaan Negeri	Law Enforcer Integrated System (LEIS)	https://leis.solokkota.go.id/	Tidak Aktif
40	Dinas Komunikasi Dan Informatika	Aplikasi untuk klipring Berita	Klipring Digital Kota Solok	https://eklipring.solokkota.go.id/	Aktif
41	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	Aplikasi Sistem Antrian Layanan Dinas Dukcapil secara Offline	Antrian Layanan Disdukcapil	http://localhost/antrian/	Aktif
42	Badan Keuangan Daerah	Aplikasi Akuntansi Koperasi	Aplikasi Akuntansi Koperasi	http://192.168.14.250/kopsolok/	Aktif

No.	Instansi Pengelola	Aplikasi	Nama Aplikasi	Alamat Web	Status
43	Kwarcab Pramuka Kota Solok	Aplikasi Pramuka	Aplikasi Pramuka	https://satya.solokkota. go.id/, https:// satya.solokkota.org/	Aktif
44	Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	Sistem Informasi Pengelolaan Kendaraan Dinas	SIPANAS	sipanas.jar (Aplikasi Desktop)	Aktif

Sumber: Bidang Informatika dan Persandian Diskominfo Kota Solok

Untuk jumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan UPTD yang terhubung dengan jaringan solokkota, pada tahun 2024 tercatat sebanyak 64 OPD telah terkoneksi, sedangkan pada tahun 2025 menjadi 62 OPD. Penurunan jumlah ini disebabkan oleh adanya penggabungan Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) pada beberapa OPD.

Meskipun demikian, penurunan tersebut tidak menunjukkan perubahan yang signifikan terhadap ketersediaan layanan jaringan internet, karena tidak seluruh jaringan pada OPD yang mengalami penggabungan dicabut atau dipindahkan. Hal ini mencerminkan bahwa infrastruktur jaringan tetap terjaga dan terus mendukung keberlangsungan layanan pemerintahan berbasis elektronik secara optimal. Jumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan UPTD yang terhubung dengan jaringan internet (jaringan solokkota.go.id) sampai tahun 2025 dapat dilihat pada Tabel 4.10.

Tabel 4.10

Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan UPTD yang Terhubung Jaringan Internet

	Perangkat Daerah	Fasilitas Akses Internet		Ket
		Jenis Layanan/ Jaringan	Alokasi Bandwidth	
1	Sekretariat Daerah	Internet	100 Mbps	
2	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	Internet	100 Mbps	
3	Dinas Pendidikan	Internet	100 Mbps	

a	UPTD Sanggar Kegiatan Belajar	Internet	100 Mbps	
4	Dinas Kesehatan	Internet	100 Mbps	
a	Puskesmas Tanjung Paku	Internet	100 Mbps	
b	Puskesmas KTK	Internet	100 Mbps	
c	Puskesmas Nan Balimo	Internet	100 Mbps	
d	UPTD Instalasi Farmasi Dan Alat Kesehatan	Internet	100 Mbps	
e	UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah	Internet	100 Mbps	
f	Puskesmas Tanah Garam	Internet	100 Mbps	
g	UPTD RSUD Serambi Madinah	Internet	100 Mbps	
5	Dinas Komunikasi dan Informatika	Internet	100 Mbps	
6	Dinas Pariwisata	Internet	100 Mbps	
7	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Internet	100 Mbps	
8	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Internet	100 Mbps	
9	Dinas Pertanian	Internet	100 Mbps	
a	UPTD Balai Benih Ikan	Internet	100 Mbps	
b	UPTD Rumah Potong Hewan	Internet	100 Mbps	
c	UPTD BPP Kec. Tanjung Harapan	Internet	100 Mbps	
d	UPTD BPP Kec. Lubuk Sikarah	Internet	100 Mbps	
e	UPTD Pusat Kesehatan Hewan	Internet	100 Mbps	
10	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	Internet	100 Mbps	
11	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Internet	100 Mbps	
12	Dinas Perdagangan dan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	Internet	100 Mbps	
13	Badan Penelitian dan Pengembangan	Internet	100 Mbps	
14	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Internet	100 Mbps	

Perangkat Daerah		Fasilitas Akses Internet		Ket
		Jenis Layanan/ Jaringan	Alokasi Bandwidth	
15	Badan Keuangan Daerah	Internet	100 Mbps	
a	UPTD Fasilitasi Pembiayaan	Internet	100 Mbps	
16	Dinas Pemuda dan Olahraga	Internet	100 Mbps	
17	Inspektorat Daerah	Internet	100 Mbps	
18	Dinas Pangan	Internet	20 Mbps	
19	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak	Internet	100 Mbps	
20	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Internet	100 Mbps	
21	Dinas Sosial	Internet	100 Mbps	
22	Satuan Polisi Pamong Praja	Internet	100 Mbps	
23	Dinas Perhubungan	Internet	100 Mbps	
a	UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor	Internet	100 Mbps	
b	UPTD Terminal Lintas Sumatera	Internet	100 Mbps	
24	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	Internet	100 Mbps	
25	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Internet	100 Mbps	
26	Dinas Lingkungan Hidup	Internet	100 Mbps	
27	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	Internet	180 Mbps	
28	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Internet	100 Mbps	
29	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Internet	100 Mbps	
a	UPTD BPKB Kecamatan Lubuk Sikarah	Internet	100 Mbps	
b	UPTD BPKB Kecamatan Tanjung Harapan	Internet	100 Mbps	

Perangkat Daerah		Fasilitas Akses Internet		Ket
		Jenis Layanan/ Jaringan	Alokasi Bandwidth	
30	Kecamatan Lubuk Sikarah	Internet	100 Mbps	
a	Kelurahan Tanah Garam	Internet	100 Mbps	
b	Kelurahan VI Suku	Internet	100 Mbps	
c	Kelurahan Sinapa Piliang	Internet	100 Mbps	
d	Kelurahan IX Korong	Internet	100 Mbps	
e	Kelurahan Kampai Tabu Karambia	Internet	100 Mbps	
f	Kelurahan Aro IV Korong	Internet	100 Mbps	
g	Kelurahan Simpang Rumbio	Internet	100 Mbps	
31	Kecamatan Tanjung Harapan	Internet	100 Mbps	
a	Kelurahan Tanjung Paku	Internet	100 Mbps	
b	Kelurahan Nan Balimo	Internet	100 Mbps	
c	Kelurahan Pasar Pandan Air Mati	Internet	100 Mbps	
d	Kelurahan Koto Panjang	Internet	100 Mbps	
e	Kelurahan Kampung Jawa	Internet	100 Mbps	
f	Kelurahan Laing	Internet	100 Mbps	

Sumber: Bidang Informatika dan Persandian Diskominfo Kota Solok

Blankspot merupakan kondisi wilayah yang belum terjangkau atau memiliki keterbatasan akses terhadap jaringan internet dan layanan telekomunikasi. Kondisi ini umumnya disebabkan oleh faktor geografis, keterbatasan infrastruktur, serta belum meratanya pembangunan jaringan komunikasi.

Berikut pemetaan Blankspot Kota Solok tahun 2025, sebagaimana tersaji pada Tabel 4.11.

Tabel 4.11
Daftar Pemetaan Blankspot di Kota Solok Tahun 2025

No	Wilayah	<i>Titik/Lokasi Blankspot</i>	Layanan Pendidikan (SD/SMP/SMA/SMK) *	Layanan Kesehatan (Puskesmas/Rumah Sakit) *
13	Provinsi Sumatera Barat			
13.72	Kota Solok	0	0	0
13.72.01	<u>Kecamatan Lubuk Sikarah</u>	0	0	0
13.72.01.1001	Kelurahan Tanah Garam	0	0	0
13.72.01.1002	Kelurahan VI Suku	0	0	0
13.72.01.1003	Kelurahan Sinapa Piliang	0	0	0
13.72.01.1004	Kelurahan IX Korong	0	0	0
13.72.01.1005	Kelurahan Kampai Tabu Karambia	0	0	0
13.72.01.1006	Kelurahan Aro IV Korong	0	0	0
13.72.01.1007	Kelurahan Simpang Rumbio	0	0	0

13.72.02	Kecamatan Tanjung Harapan	0	0	0
13.72.02.1001	Kelurahan Koto Panjang	0	0	0
13.72.02.1002	Kelurahan Pasar Pandan Air Mati	0	0	0
13.72.02.1003	Kelurahan Tanjung Paku	0	0	0
13.72.02.1004	Kelurahan Nan Balimo	0	0	0
13.72.02.1005	Kelurahan Kampung Jawa	0	0	0
13.72.02.1006	Kelurahan Laing	0	0	0

Sumber : Bidang Informatika dan Persandian Diskominfo Kota Solok

Pemerintah Kota Solok telah menerapkan penggunaan email resmi perangkat daerah sebagai bagian dari upaya penguatan tata kelola pemerintahan berbasis elektronik dan peningkatan kualitas komunikasi kedinasan. Penggunaan email resmi ini menjadi sarana komunikasi formal yang mendukung keamanan, kecepatan, serta keakuratan pertukaran informasi antar perangkat daerah maupun dengan pihak eksternal.

Sebagai landasan pelaksanaannya, pada tahun 2018 telah ditetapkan Keputusan Walikota Solok Nomor 188.45 - 93 Tahun 2018 yang menetapkan sebanyak 55 alamat email resmi perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kota Solok. Penetapan tersebut merupakan bentuk komitmen pemerintah daerah dalam mendukung implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), mewujudkan komunikasi kedinasan yang lebih tertib, profesional, dan terintegrasi.

Seiring perkembangan organisasi perangkat daerah dan adanya perubahan Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK), pengelolaan email resmi perangkat daerah juga mengalami penyesuaian. Perubahan SOTK menyebabkan adanya penggabungan, perubahan nomenklatur, maupun penyesuaian fungsi beberapa perangkat daerah, sehingga diperlukan penataan kembali penggunaan dan pengelolaan alamat email resmi agar tetap sesuai dengan struktur organisasi

yang berlaku. Meskipun demikian, keberadaan email resmi tetap menjadi salah satu sarana penting dalam mendukung komunikasi pemerintahan yang efektif, terintegrasi, dan profesional di lingkungan Pemerintah Kota Solok. Berikut daftar email resmi pada tahun 2025, sebagaimana tersaji pada Tabel 4.12.

Tabel 4.12
Daftar E-Mail Resmi Perangkat Daerah

NO	NAMA OPD	E-MAIL
1	badan perencanaan pembangunan daerah	bappeda@solokkota.go.id
2	badan penelitian dan pengembangan	balitbang@solokkota.go.id
3	badan penanggulangan bencana daerah	bpbd@solokkota.go.id
4	badan keuangan daerah	bkd@solokkota.go.id
5	badan kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia	bkpsdm@solokkota.go.id
6	dinas sosial	dinsos@solokkota.go.id
7	dinas perumahan dan kawasan permukiman	perkim@solokkota.go.id
8	dinas pertanian	pertanian@solokkota.go.id
9	dinas perpustakaan dan kearsipan	dpk@solokkota.go.id
10	dinas perhubungan	dishub@solokkota.go.id
11	dinas perdagangan dan koperasi usaha kecil dan menengah	dpkukm@solokkota.go.id
12	dinas pengendalian penduduk dan keluarga berencana	dispenduk-kb@solokkota.go.id
13	dinas pendidikan	disdik@solokkota.go.id
14	dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu	pmptsp@solokkota.go.id
15	dinas pemuda dan olahraga	dispora@solokkota.go.id
16	dinas pemberdayaan masyarakat, perempuan dan perlindungan anak	dpppa@solokkota.go.id
17	dinas pemadam kebakaran dan penyelamatan	damkar@solokkota.go.id

NO	NAMA OPD	E-MAIL
18	dinas pekerjaan umum dan penataan ruang	pupr@solokkota.go.id
19	dinas pariwisata	dispar@solokkota.go.id
20	dinas pangan	dinaspangan@solokkota.go.id
21	dinas lingkungan hidup	dlh@solokkota.go.id
22	dinas komunikasi dan informatika	kominfo@solokkota.go.id
23	dinas kesehatan	dinkes@solokkota.go.id
24	dinas kependudukan dan pencatatan sipil	disdukcapil@solokkota.go.id
25	sekretariat dewan perwakilan rakyat daerah	set.dprd@solokkota.go.id
26	sekretariat daerah	sekda@solokkota.go.id
27	satuan polisi pamong praja	satpolpp@solokkota.go.id
28	kecamatan tanjung harapan	tanjungharapan@solokkota.go.id
29	kecamatan lubuk sikarah	lubuksikarah@solokkota.go.id
30	kantor kesatuan bangsa dan politik	kesbangpol@solokkota.go.id
31	inspektorat daerah	inspektorat@solokkota.go.id
32	Kelurahan Aro IV Korong	kel.aroivkorong@solokkota.go.id
33	Kelurahan IX Korong	kel.ixkorong@solokkota.go.id
34	Kelurahan Kampung Jawa	kel.kampungjawa@solokkota.go.id
35	Kelurahan Koto Panjang	kel.kotopanjang@solokkota.go.id
36	Kelurahan KTK	kel.ktk@solokkota.go.id
37	Kelurahan Laing	kel.laing@solokkota.go.id
38	Kelurahan Nan Balimo	kel.nanbalimo@solokkota.go.id
39	Kelurahan PPA	kel.ppa@solokkota.go.id
40	Kelurahan Simpang Rumbio	kel.simpangrumbio@solokkota.go.id
41	Kelurahan Sinapa Piliang	kel.sinapapiliang@solokkota.go.id
42	Kelurahan Tanah Garam	kel.tanahgaram@solokkota.go.id
43	Kelurahan Tanjung Paku	kel.tanjungpaku@solokkota.go.id
44	Kelurahan VI Suku	kel.visuku@solokkota.go.id

Sumber: Bidang Informatika dan Persandian Diskominfo Kota Solok

Sub domain merupakan bagian turunan dari domain utama yang digunakan untuk membedakan fungsi, layanan, atau unit kerja tertentu dalam suatu sistem informasi. Penggunaan sub domain bertujuan untuk mempermudah pengelolaan layanan digital, meningkatkan identitas masing-masing perangkat daerah, serta mendukung keteraturan akses layanan berbasis elektronik. Dengan adanya sub domain, setiap perangkat daerah dapat memiliki alamat layanan yang lebih spesifik, terstruktur, dan mudah dikenali oleh masyarakat maupun pengguna layanan internal pemerintah.

Sesuai ketentuan dalam Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, Kota Solok telah memiliki domain resmi pemerintah daerah yaitu *solokkota.go.id* sebagai identitas resmi penyelenggaraan layanan pemerintahan berbasis elektronik. Domain tersebut digunakan sebagai induk pengelolaan layanan digital pemerintah daerah, termasuk penggunaan sub domain pada masing-masing perangkat daerah guna mendukung keterpaduan, keamanan, serta kemudahan akses layanan informasi dan administrasi pemerintahan.

Sub domain pada umumnya digunakan sebagai nama alias dari aplikasi atau layanan elektronik di lingkungan pemerintah daerah sehingga lebih mudah diakses, dikenali, dan dikelola. Selain itu, penggunaan sub domain juga mendukung kebutuhan pengelolaan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi, seperti layanan jaringan internet, CCTV, *e-sign*, integrasi layanan, pusat data, serta berbagai layanan digital lainnya. Penggunaan sub domain tersebut bertujuan untuk menciptakan tata kelola layanan elektronik yang terstruktur, aman, dan terintegrasi sesuai dengan penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Kota Solok.

Skor akhir Indeks KAMI di Pemerintah Kota Solok adalah 475 dari 916 skor maksimum dengan capaian kinerja 51,7% atau Level II . menandakan bahwa tingkat kesiapan pengamanan informasi Pemerintah Kota Solok masih pada tahapan penerapan kerangka kerja dasar keamanan informasi. Tingkat Keamanan Informasi Pemerintah” masih pada Level 2+ dengan persentase capaian kinerja sebesar 83,33% atau masih di bawah target akhir Renstra.

Dari hasil assessment keamanan informasi diperoleh Tingkat kesiapan pengamanan informasi pemerintah Kota Solok sebesar 51,9%, mengalami penurunan dibandingkan realisasi tahun 2024 sebesar 68,7%. Hal ini dikarenakan adanya perubahan instrumen asesmen dari KAMI versi 4.2 menjadi KAMI versi 5.0, dimana terdapat penambahan indikator asesmen sehingga jumlah area penilaian bertambah dari total sebanyak 645 area menjadi total sebanyak 916 area penilaian.

2. Bidang Informasi dan Komunikasi Publik

Capaian realisasi data sektoral pada bidang Informasi dan Komunikasi menunjukkan komitmen pemerintah daerah dalam mendukung penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik melalui penyediaan data yang akurat, terintegrasi, dan berkelanjutan. Data sektoral tersebut menjadi dasar dalam pengambilan kebijakan, pengembangan layanan digital, pengelolaan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi, serta mendukung keterbukaan informasi publik di Kota Solok. Tabel 2.13 berikut menyajikan capaian realisasi data sektoral pada Bidang Informasi dan Komunikasi.

Tabel 4.13

Capaian Realisasi Data Sektoral pada Bidang Informasi dan Komunikasi

No	Data	Realisasi Data Sektoral	
		Tahun 2024	Tahun 2025
1	Jumlah pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	54	31
2	Jumlah pengaduan masyarakat yang tidak ditindaklanjuti	2	1
3	Jumlah langganan media online	23	25
4	Jumlah langganan media cetak	16	13
5	Jumlah berita Kota Solok yang dipublikasikan di media online	5880	2115
6	Indeks keterbukaan informasi publik	68,87	82,71
7	Persentase Masyarakat yang mengetahui Program Prioritas Pemerintah	97%	79,67%

Jumlah pengaduan yang masuk melalui SP4N-LAPOR pada tahun 2024 tercatat sebanyak 54 aduan, sedangkan pada tahun 2025 menurun menjadi 31 aduan. Pada tahun 2024 terdapat 2 aduan yang diarsipkan, sementara pada tahun 2025 terdapat 1 aduan yang diarsipkan. Pengarsipan tersebut dilakukan karena terdapat kesamaan substansi pada aduan yang diterima.

Berdasarkan data Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat, Indeks Keterbukaan Informasi Publik masih di bawah target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

(RPJMD) Kota Solok Tahun 2021-2026 yaitu sebesar 85 dengan tingkat capaian 97,31%. Dibandingkan dengan tahun sebelumnya capaian 2025 terdapat peningkatan yang signifikan.

Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah Kota Solok Tahun 2025 sebesar 79,67%, mengalami penurunan dibandingkan tahun 2024 lalu yang mencapai 97%. Hal ini bias disebabkan oleh pemilihan sampel yang kurang tepat, jumlah responden yang berbeda juga dapat mengakibatkan bias hasil.

Tabel 4.14 berikut menyajikan daftar langganan media online dan media cetak tahun 2025.

Tabel 4.14

Daftar Media Online dan Cetak yang Berlangganan Tahun 2025

Media Online	Media Cetak
1. Antara	1. Harian Haluan
2. Benteng	2. Harian khazanah
3. Denbagus	3. Harian Koran Padang
4. Figurnews	4. Harian Padang Ekspres
5. Indonesiasatu	5. Harian Posmetro Padang
6. Infonews	6. Harian Rakyat Sumbar
7. Infosumbar	7. Harian Singgalang
8. Integritasmedia	8. Mingguan Lintas Media
9. Investigasinews	9. Mingguan Media Rakyat
10. Kabarsumbar	10. Mingguan Rakyat Sumbar
11. Klikpositif	11. Tabloid Sumbar Post
12. Kupasonline	12. Tabloid Target
13. Lintasmedia	13. Tabloid Zaman
14. Liputankini	
15. Minakonews	
16. Minangsatu	
17. Minangkabaunews	
18. Patronmedia	
19. Prnewsapresisi	
20. Rakyatterkini.com	

Media Online	Media Cetak
21. Realitakini.com 22. Reportaseinvestigasi 23. Sumut24 24. Topsumbar 25. Utamapost	

Sumber : Bidang Informasi dan Komunikasi Diskominfo Kota Solok

3. Bidang Tata Kelola *E-Government* dan Statistik

Capaian realisasi data sektoral pada bidang Tata Kelola *E-Government* dan Statistik menunjukkan upaya pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan berbasis elektronik serta pengelolaan data statistik sektoral yang terintegrasi. Data tersebut dimanfaatkan sebagai dasar perencanaan, monitoring, evaluasi, dan pengambilan kebijakan guna mendukung penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, akuntabel, dan berbasis data di Kota Solok. Tabel 4.15 berikut menggambarkan Capaian Realisasi Data Sektoral pada bidang Tata Kelola E-Government dan Statistik.

Tabel 4.15

Capaian Realisasi Data Sektoral pada bidang Tata Kelola E-Government dan Statistik

No	Data	Realisasi Data Sektoral	
		Tahun 2024	Tahun 2025
1	Jumlah data sektoral yang terpublikasi pada sipd <i>e-walidata</i>	4111	Pengentrian data dilakukan tahun 2026
2	Persentase perangkat daerah yang menggunakan statistik dasar dan statistik sektoral dalam perencanaan maupun evaluasi pembangunan	100%	100%
3	Nilai Indeks Pembangunan Statistik	2,61	Tidak Ada Penilaian
4	Nilai Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	3,75	4,2

No	Data	Realisasi Data Sektoral	
		Tahun 2024	Tahun 2025
5	Nilai Indeks Masyarakat Digital Indonesia	46,25	54,38
6	Jumlah sebaran cctv	15	17

Dari table di atas terlihat bahwa dari pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan statistik sektoral (EPSS) Tahun 2024, Kota Solok memperoleh nilai indeks Pembangunan statistik (IPS) Kota Solok: 2,61 (Kategori Baik). Adapun periode penyelenggaraan EPSS oleh BPS setiap dua tahun sekali sehingga tidak ada nilai IPS tahun 2025.

Sedangkan Indeks SPBE berdasarkan evaluasi penyelenggaraan Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE) untuk tahun 2025 ditargetkan nilai 3,8 dengan realisasi 4,2 sesuai data Kementertian Menpan RB RI 2022-2025, dengan demikian tingkat capaian Indeks SPBE sebesar 110,53%. Hasil penilaian tahun 2025 bersumber dari surat Menteri PANRB No.B/76/M.PD.06/2025 Hal penyampaian Hasil Pemantauan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Tahun 2025. Rincian hasil evaluasi SPBE tahun 2025 dapat dilihat pada Tabel 4.16

Tabel 4.16

Rincian Hasil Evaluasi SPBE Tahun 2025

Nama Indeks	Nilai 2025	Nilai 2024
SPBE	4,20	3,75
Domain Kebijakan SPBE	4,70	4,10
<i>Kebijakan Internal Tata Kelola SPBE</i>	4,70	4,10
Domain Tata Kelola SPBE	4,40	3,90
<i>Perencanaan Strategis SPBE</i>	4,25	3,75
<i>Teknologi Informasi dan Komunikasi</i>	4,50	4,25
<i>Penyelenggara SPBE</i>	4,50	3,50
Domain Manajemen SPBE	2,45	1,18
<i>Penerapan Manajemen SPBE</i>	2,63	1,25
<i>Audit TIK</i>	2,00	1,00
Domain Layanan SPBE	4,58	4,51
<i>Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik</i>	4,30	4,40
<i>Layanan Publik Berbasis Elektronik</i>	5,00	4,67

Indeks Masyarakat Digital Indonesia (IMDI) merupakan inisiatif Indonesia dalam presidensi G-20 dengan tujuan untuk menyediakan panduan bagi negara-negara G-20 dalam mengukur tingkat literasi dan keterampilan digital masyarakat., survei dilakukan oleh badan pengembangan sumber daya manusia kementerian komunikasi dan digital.

Berdasarkan publikasi pada website imdi.sdmdigital.id capaian IMDI kotasolok tahun 2025 pada nilai 54,38 dengan rincian sebagai berikut:

1. Pilar Infrastruktur dan Ekosistem dengan nilai 64,68
2. Pilar Keterampilan Digital dengan nilai 62,66
3. Pilar Pemberdayaan dengan nilai 41,46
4. Pilar Pekerjaan dengan nilai 49,52

E-Walidata merupakan sistem atau layanan yang digunakan untuk mendukung pengelolaan data sektoral secara terintegrasi dalam penyelenggaraan Satu Data Indonesia dan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. Melalui *E-Walidata*, proses pengumpulan, pemeriksaan, validasi, pengelolaan, hingga publikasi data dapat dilakukan secara lebih terstruktur, akurat, dan berkelanjutan. Keberadaan layanan ini mendukung terciptanya data yang berkualitas sebagai dasar perencanaan, pengambilan kebijakan, evaluasi pembangunan, serta meningkatkan interoperabilitas data antar perangkat daerah di Kota Solok.

Sebagai walidata, Dinas Komunikasi dan Informatika berperan mengkoordinasikan pengumpulan data sektoral dari perangkat daerah melalui portal <https://www.sipd.go.id/ewalidata/>, pelaksanaan verifikasi dan validasi data, memastikan kesesuaian standar data dan metadata, serta melakukan pembinaan kepada produsen data agar data yang diinput memenuhi prinsip akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Berdasarkan Tabel 4.15 data sektoral dari perangkat daerah tahun 2024 yang dipublikasi pada portal e_walidata sebanyak 4111, sedangkan untuk tahun 2025 ini baru dapat dipublikasi pada awal tahun 2026 nanti. Daftar data sektoral Perangkat Daerah tahun 2024 yang dipublikasi pada portal e_walidata dapat dilihat pada Tabel 4.17 berikut:

Tabel 4.17
Daftar Data E-Walidata Tahun 2024

No	Nama Urusan	Data Induk	Digunakan	Terisi	Tidak Terisi	Walidata	Penyebarluasan
1	1.01 - urusan pemerintahan bidang pendidikan	702	493	493	0	493	493

No	Nama Urusan	Data Induk	Digunakan	Terisi	Tidak Terisi	Walidata	Penyebarluasan
2	1.02 - urusan pemerintahan bidang kesehatan	266	266	266	0	266	266
3	1.03 - urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang	533	496	442	54	440	440
4	1.04 - urusan pemerintahan bidang perumahan dan kawasan permukiman	184	184	184	0	184	184
5	1.05 - urusan pemerintahan bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat	224	188	187	1	186	186
6	1.06 - urusan pemerintahan bidang sosial	117	117	117	0	117	117
7	2.07 - urusan pemerintahan bidang tenaga kerja	44	44	44	0	44	44
8	2.08 - urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	42	42	41	1	41	41

No	Nama Urusan	Data Induk	Digunakan	Terisi	Tidak Terisi	Walidata	Penyebarluasan
9	2.09 - urusan pemerintahan bidang pangan	52	52	43	9	43	43
10	2.10 - urusan pemerintahan bidang pertanahan	122	106	62	44	62	62
11	2.11 - urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup	248	246	246	0	246	246
12	2.12 - urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil	65	65	65	0	65	65
13	2.13 - urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa	31	31	31	0	31	31
14	2.14 - urusan pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana	77	77	72	5	72	72
15	2.15 - urusan pemerintahan bidang perhubungan	260	210	205	5	205	205

No	Nama Urusan	Data Induk	Digunakan	Terisi	Tidak Terisi	Walidata	Penyebarluasan
16	2.16 - urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika	82	82	82	0	82	82
17	2.17 - urusan pemerintahan bidang koperasi, usaha kecil, dan menengah	41	41	41	0	41	41
18	2.18 - urusan pemerintahan bidang penanaman modal	25	25	25	0	25	25
19	2.19 - urusan pemerintahan bidang kepemudaan dan olahraga	23	23	23	0	23	23
20	2.20 - urusan pemerintahan bidang statistik	22	22	22	0	22	22
21	2.21 - urusan pemerintahan bidang persandian	8	8	8	0	8	8
22	2.22 - urusan pemerintahan bidang kebudayaan	114	105	105	0	105	105
23	2.23 - urusan pemerintahan bidang perpustakaan	47	47	47	0	47	47
24	2.24 - urusan pemerintahan bidang kearsipan	22	22	22	0	22	22

No	Nama Urusan	Data Induk	Digunakan	Terisi	Tidak Terisi	Walidata	Penyebarluasan
25	3.25 - urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan	122	97	97	0	97	97
26	3.26 - urusan pemerintahan bidang pariwisata	115	115	115	0	115	115
27	3.27 - urusan pemerintahan bidang pertanian	369	369	326	43	325	325
28	3.28 - urusan pemerintahan bidang kehutanan	9	0	0	0	0	0
29	3.29 - urusan pemerintahan bidang energi dan sumber daya mineral	2	0	0	0	0	0
30	3.30 - urusan pemerintahan bidang perdagangan	61	61	61	0	61	61
31	3.31 - urusan pemerintahan bidang perindustrian	60	60	60	0	60	60
32	3.32 - urusan pemerintahan bidang transmigrasi	60	0	0	0	0	0
33	4.01 - sekretariat daerah	156	108	60	48	57	57
34	4.02 - sekretariat dprd	50	48	48	0	48	48
35	5.01 - perencanaan	59	59	59	0	59	59

No	Nama Urusan	Data Induk	Digunakan	Terisi	Tidak Terisi	Walidata	Penyebarluasan
36	5.02 - keuangan	103	103	103	0	103	103
37	5.03 - kepegawaian	47	47	47	0	47	47
38	5.04 - pendidikan dan pelatihan	26	26	26	0	26	26
39	5.05 - penelitian dan pengembangan	82	78	78	0	78	78
40	5.06 - pengelolaan perbatasan	26	0	0	0	0	0
41	5.07 - pengelolaan penghubung	5	0	0	0	0	0
42	6.01 - inspektorat daerah	16	15	15	0	15	15
43	7.01 - kecamatan administrasi	96	74	74	0	74	74
44	8.01 - kesatuan bangsa dan politik	76	76	76	0	76	76
45	9.01 - kekhususan aceh	154	0	0	0	0	0
46	9.02 - kekhususan papua	20	0	0	0	0	0
47	9.03 - kekhususan papua barat	3	0	0	0	0	0
48	7.02 - kota administrasi	50	0	0	0	0	0
49	7.03 - kabupaten administrasi	41	0	0	0	0	0

Sumber: <https://sipd.go.id/ewalidata> (Bidang Tata Kelola E-Government dan Statistik)

Closed-Circuit Television (CCTV) yaitu sistem kamera pengawas yang digunakan untuk memantau dan merekam aktivitas pada lokasi tertentu secara terbatas melalui jaringan khusus atau sistem tertutup.

Pemanfaatan CCTV merupakan bagian dari pengembangan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi dalam mendukung keamanan, pengawasan, serta monitoring aktivitas pada fasilitas publik dan lingkungan pemerintahan. CCTV digunakan untuk membantu pemantauan kondisi lapangan secara real time, mendukung ketertiban dan keamanan, serta menjadi sarana pendukung pengambilan keputusan dan tindak lanjut terhadap kejadian tertentu. Selain itu, pengelolaan CCTV juga mendukung penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik melalui integrasi layanan pengawasan berbasis digital di Kota Solok.

Pemanfaatan CCTV di Kota Solok, sudah terlaksana dari tahun 2015. Jumlah CCTV yang dimanfaatkan untuk pemantauan area publik dan dikelola oleh Dinas Komunikasi dan Informatika hingga tahun 2025 berjumlah 17 kamera. Tabel 4.18 berikut menyajikan data CCTV area publik yang dikelola oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Solok sampai tahun 2025.

Tabel 4.18
Data CCTV Area Publik hingga Tahun 2025

NO	LOKASI	PENGADAAN	KETERANGAN	KETERANGAN
1	Rumah Dinas Wawako	2015	Arah Pantauan Lampu Merah Simpang Denpal	Pengadaan sebelum Dinas Kominfo terbentuk (Bidang Kominfo msh bagian dari Dishub)
2	Rumah Dinas Wawako	2015	Arah Pantauan SMPN 1 Kota Solok	Pengadaan sebelum Dinas Kominfo terbentuk (Bidang Kominfo msh bagian dari Dishub)
3	Simp. Ambacang	2015	Arah Pantauan Lampu Merah Simpang Ambacang	Penggantian IP Kamera ke PTZ pada tahun 2021

NO	LOKASI	PENGADAAN	KETERANGAN	KETERANGAN
4	Taman Syech Kukut	2015	Arah Pantauan Tugu Carano	Aset Dishub yang sudah rusak, kemudian fungsikan kembali dengan anggaran pemeliharaan pada tahun 2015. Penggantian IP Kamera ke PTZ pada tahun 2021
5	Simp. Rumbio	2015	Arah Pantauan Lampu Merah Simpang Rumbio	Penggantian IP Kamera ke PTZ pada tahun 2021
6	Simp. Pandan Ujung	2016	Arah Pantauan Lampu Merah Simpang Pandang Ujung	Penggantian IP Kamera ke PTZ pada tahun 2021
7	Simp. Poliguna	2017	Arah Pantauan Lampu Merah Simpang Poliguna	Penggantian IP Kamera ke PTZ pada tahun 2021
8	Simp. Denpal	2017	Arah Pantauan Lampu Merah Simpang Denpal	Pemindahan Lokasi ke depan Toko Es Teh Indonesia dan Penggantian IP Kamera ke PTZ pada tahun 2022
9	Simp. Sigege	2018	Arah Pantauan Simpang 3 Simpang Sigege	Penggantian IP Kamera ke PTZ pada tahun 2021
10	Simp. Bypass Selayo	2022	Arah Pantauan Simpang 3 Bypass	Pengadaaan Baru pada tahun 2022

NO	LOKASI	PENGADAAN	KETERANGAN	KETERANGAN
11	Simp. Kemenag	2023	Arah Pantauan Simpang 3 Kemenag	Penggantian IP Kamera ke PTZ pada tahun 2021
12	Simp 5 Laing	2023	Arah Pantauan Tugu Latsitarda	Pengadaaan Baru pada tahun 2023
13	Simp. Surya 1	2023	Arah Pantauan Bundaran Simpang Surya	Pengadaaan Baru pada tahun 2023
14	Simp. Surya 2	2023	Arah Pantauan Air Mati	Pengadaaan Baru pada tahun 2023
15	Simp. SMA Muhammadiyah	2024	Arah Pantauan Lampu Merah Simpang Muhammadiyah	Pemasangan Kamera stock persediaan pemeliharaan tahun 2024
16	Gerbang Balai Kota Solok	2024	Arah Pantauan Simpang 3 Depan Gerbang Balaikota	Pemasangan Kamera stock persediaan pemeliharaan tahun 2024
17	Depan RSUD Serambi Madinah	2025	Arah Pantauan Simpang 3 Depan Gerbang RS. Serambi Madinah	Pemasangan Kamera stock persediaan pemeliharaan tahun 2024

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Solok memiliki peran strategis sebagai pengampu urusan komunikasi publik, informatika, persandian, dan statistik sektoral dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah yang efektif, transparan, dan akuntabel. Seiring dengan perkembangan teknologi informasi dan tuntutan pelayanan publik yang semakin cepat dan terbuka, Kominfo Kota Solok telah berupaya melakukan penguatan tata kelola SPBE, peningkatan kualitas layanan informasi publik, serta pengelolaan data dan keamanan informasi secara berkelanjutan.

Berbagai program dan inovasi yang telah dilaksanakan menunjukkan komitmen Dinas Kominfo Kota Solok dalam mendukung transformasi digital pemerintahan serta memperkuat keterbukaan informasi kepada masyarakat. Namun demikian, tantangan seperti percepatan integrasi sistem, peningkatan literasi digital, penguatan keamanan siber, serta optimalisasi pemanfaatan data masih memerlukan pengembangan yang berkelanjutan.

B. Arah Pengembangan ke Depan

1. Penguatan Tata Kelola SPBE Terintegrasi

Mendorong integrasi aplikasi dan sistem informasi lintas perangkat daerah untuk menghindari duplikasi, meningkatkan interoperabilitas data, serta mendukung pengambilan keputusan berbasis data.

2. Peningkatan Kualitas Layanan Informasi Publik

Mengembangkan strategi komunikasi publik yang lebih adaptif, kreatif, dan partisipatif melalui berbagai kanal digital resmi guna meningkatkan kepercayaan dan keterlibatan masyarakat.

3. Penguatan Satu Data dan Statistik Sektoral

Memperkuat peran Kominfo sebagai walidata daerah melalui standardisasi data, peningkatan kualitas metadata, serta optimalisasi pemanfaatan data prioritas daerah.

4. Pengembangan Keamanan Informasi dan Persandian

Meningkatkan kapasitas pengamanan informasi, perlindungan data pemerintah, serta kesiapsiagaan terhadap ancaman siber melalui penerapan standar keamanan informasi dan peningkatan kompetensi SDM.

5. Peningkatan Kapasitas SDM Digital

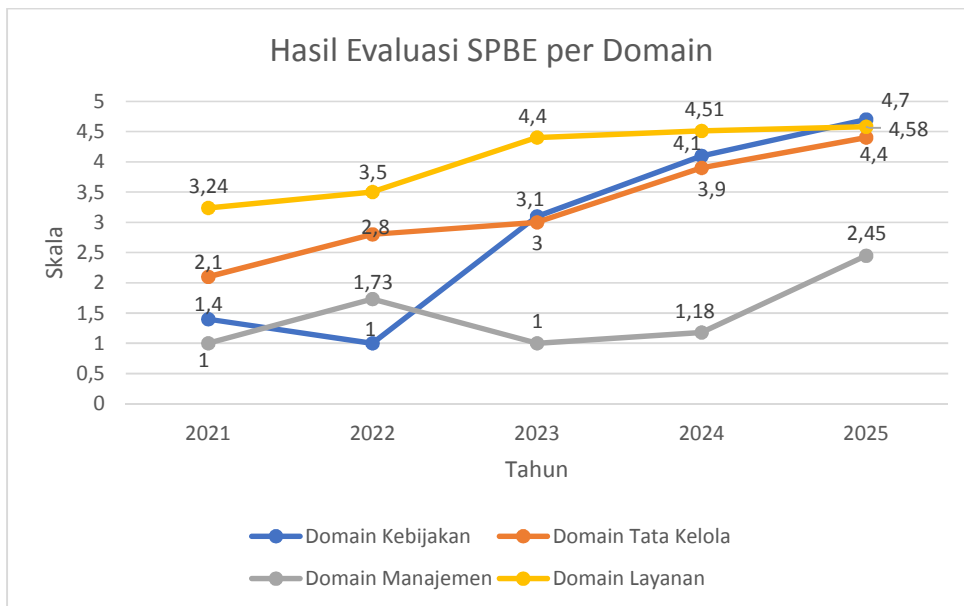
Mendorong pengembangan kompetensi aparatur di bidang TIK, statistik, dan komunikasi digital melalui pelatihan, sertifikasi, dan pembelajaran berkelanjutan.

6. Pemanfaatan Teknologi Inovatif dan Berkelanjutan

Mengarahkan pemanfaatan teknologi baru seperti analitik data, kecerdasan buatan secara bertahap dan terukur untuk mendukung efisiensi birokrasi dan kualitas layanan publik.

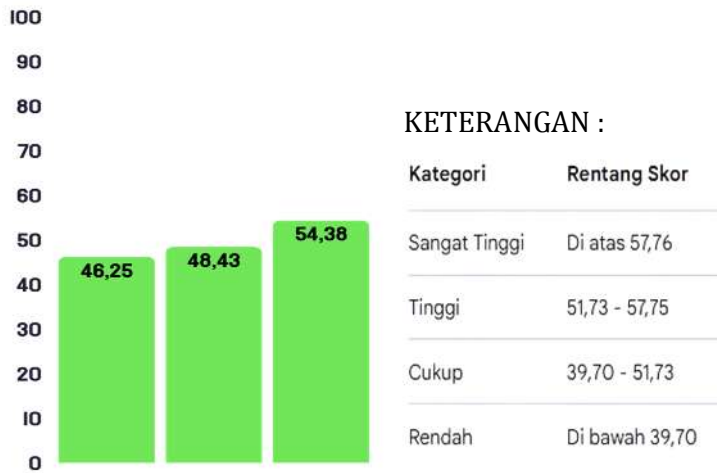
LAMPIRAN

Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)



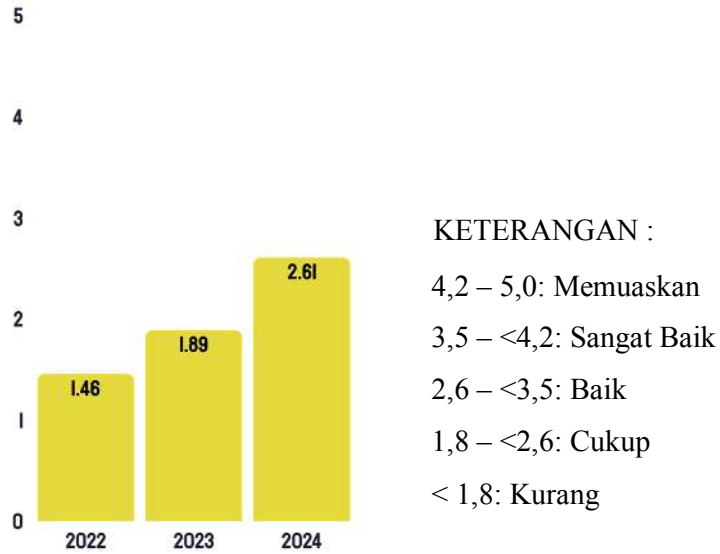
Sumber Data : Bidang Tata Kelola E-Government dan Statistik

Indeks Masyarakat Digital Indonesia (IMDI)



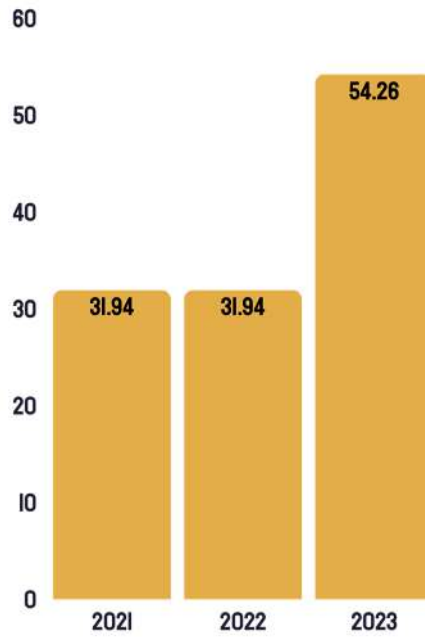
Sumber Data : Bidang Tata Kelola E-Government dan Statistik

Indeks Pembangunan Statistik (IPS)



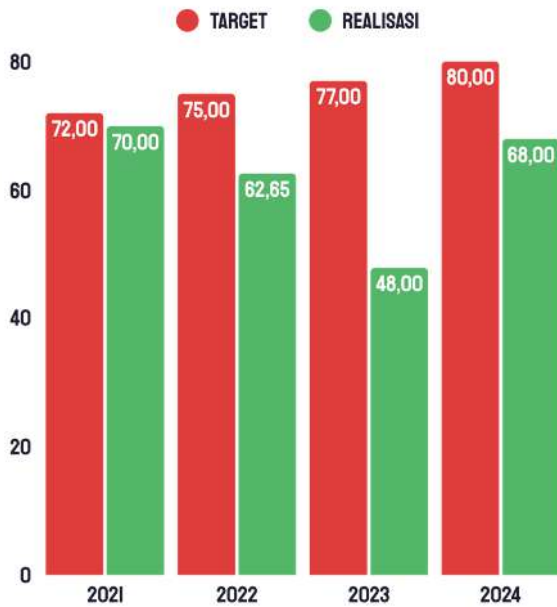
Sumber Data : Bidang Tata Kelola E-Government dan Statistik

Tingkat Keamanan Informasi



Sumber Data : Bidang Informatika dan Persandian Kota Solok

Indeks Keterbukaan Informasi Publik

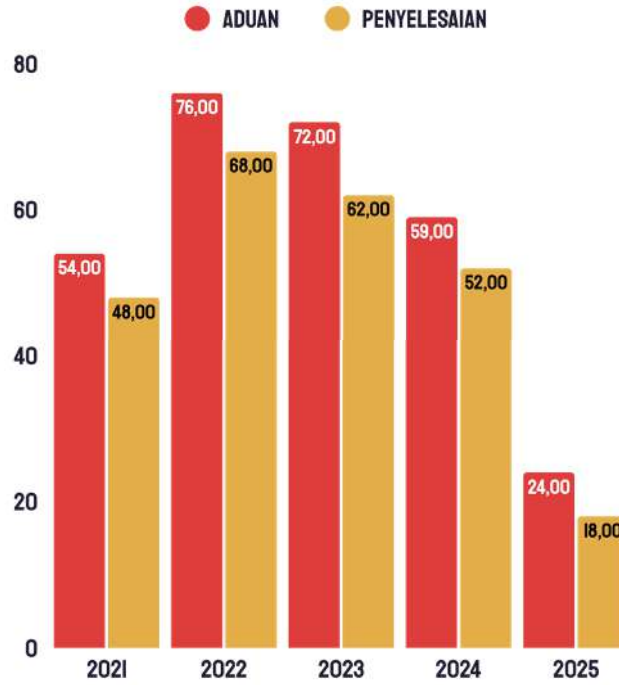


KETERANGAN :

- 90-100 INFORMATIF
- 80-89.9 MENUJU INFORMATIF
- 60-79.9 CUKUP INFORMATIF
- 40-59.9 KURANG INFORMATIF
- <39.9 TIDAK INFORMATIF

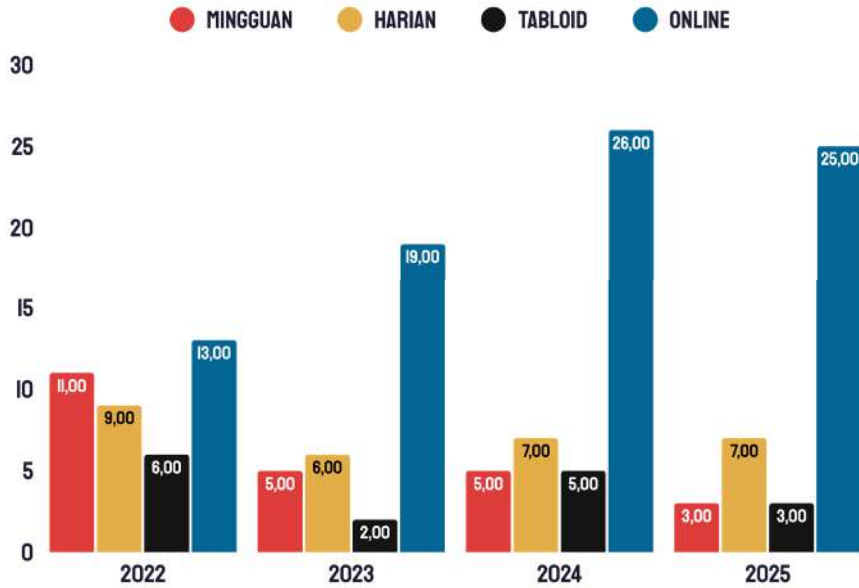
Sumber Data : Bidang Informasi dan Komuniksai Kota Solok

Pengelolaan Aduan Pada Aplikasi Lapor SP4N!



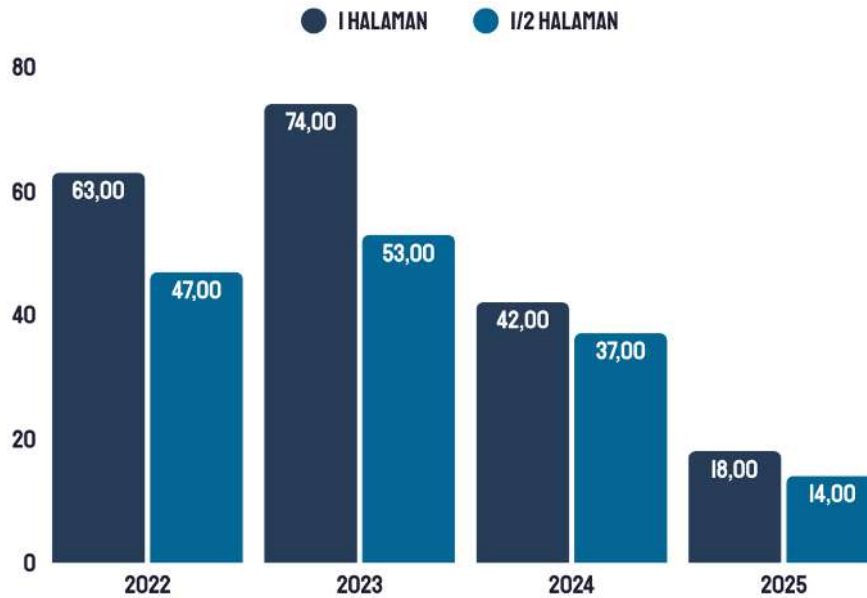
Sumber Data : Bidang Informasi dan Komuniksai Kota Solok

Data Langganan Media



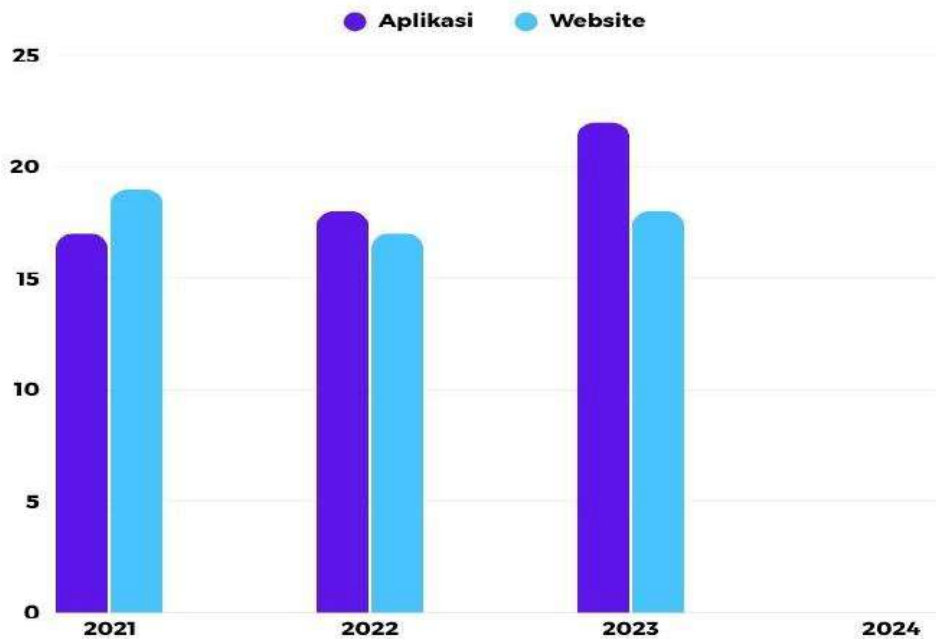
Sumber Data : Bidang Informasi dan Komuniksai Kota Solok

Data Berita Kota Solok



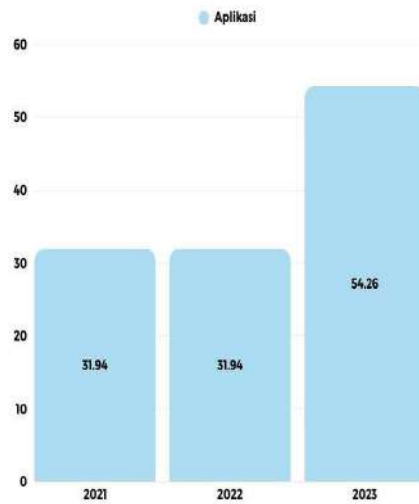
Sumber Data : Bidang Informasi dan Komuniksai Kota Solok

Jumlah Aplikasi dan Website yang dibangun/dikembangkan oleh Dinas Komindo 2020-2023



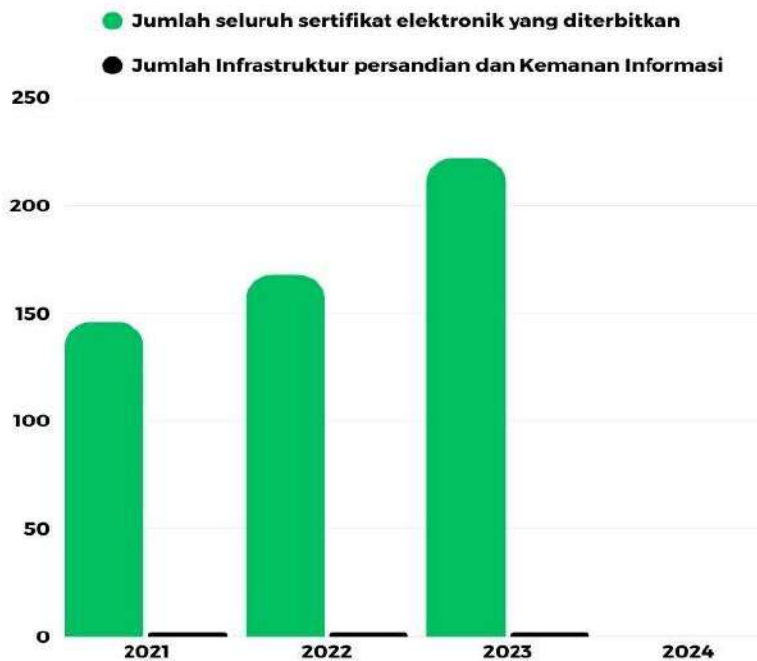
Sumber Data : Bidang Informatika dan Persandian

Jumlah Aplikasi dan Website yang dibangun/dikembangkan oleh Dinas Komindo 2020-2023



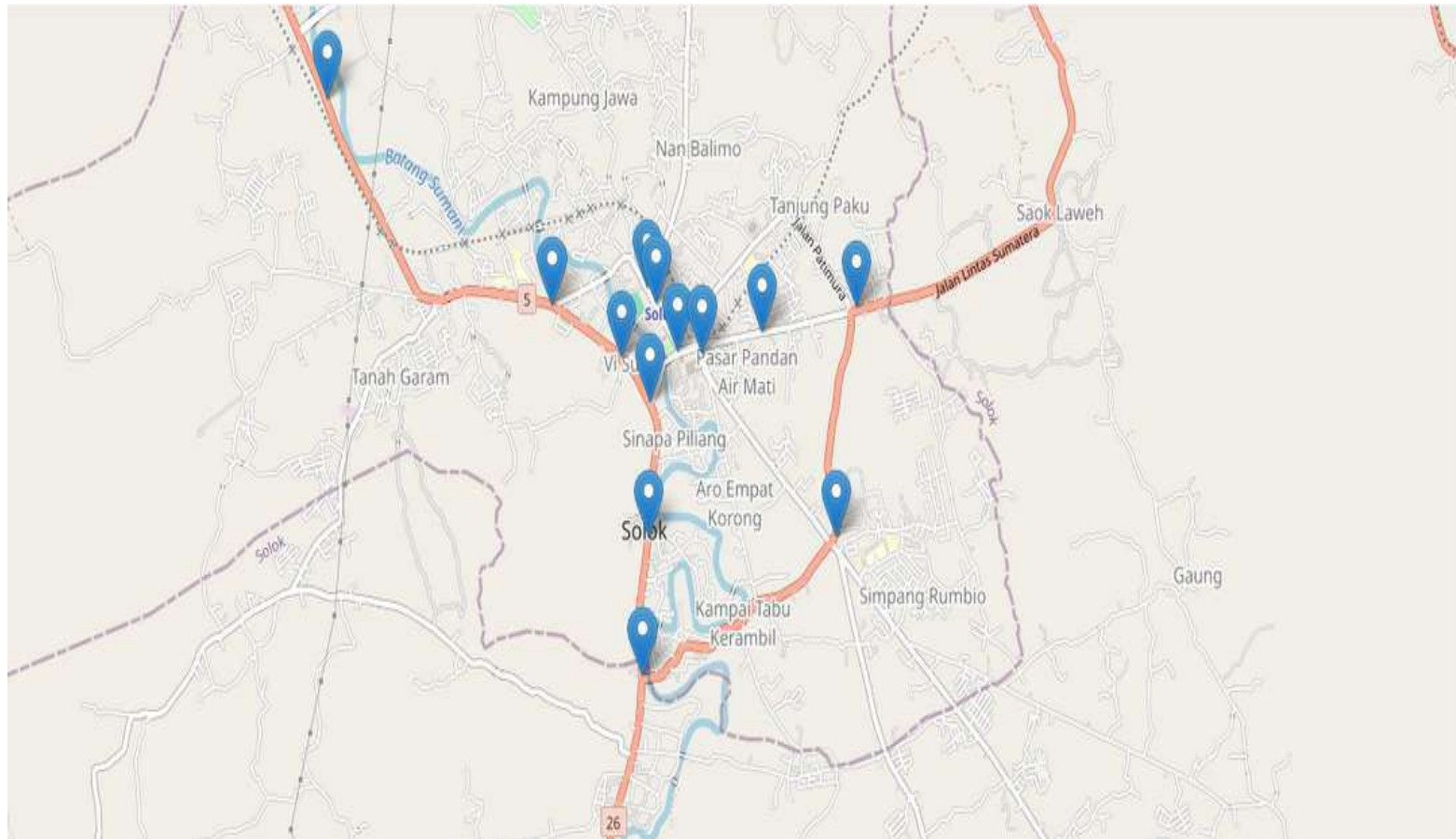
Sumber Data : Bidang Informatika dan Persandian

Jumlah sertifikat elektronik yang diterbitkan dan jumlah Infrastruktur persandian dan Keamanan Informasi tahun 2021-2023



Sumber Data : Bidang Informatika dan Persandian

Titik Sebaran Closed-Circuit Television (CCTV) Area Publik

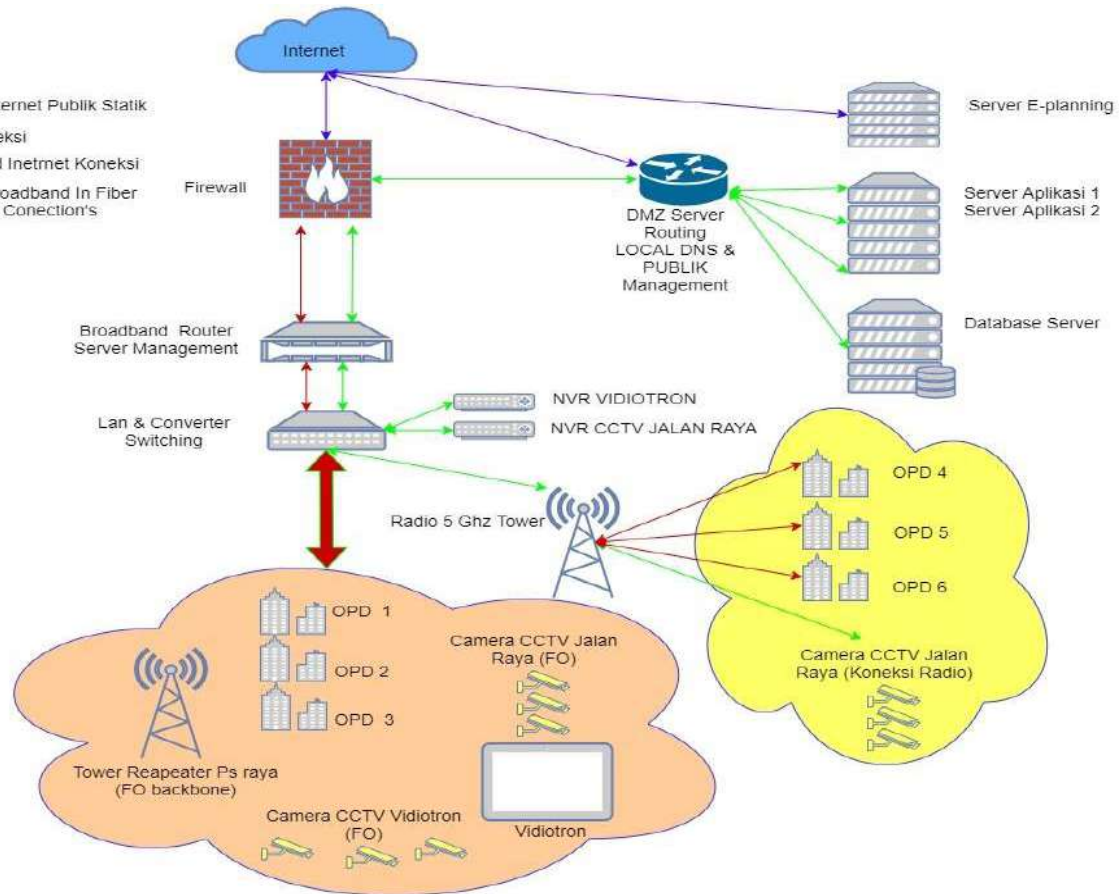


Sumber Data : Bidang Tata Kelola E-Government dan Statistik

Topologi Jaringan Kota Solok

Keterangan :

-  Koneksi Internet Publik Statik
-  Local Koneksi
-  Broadband Inetmet Koneksi
-  Local & Broadband In Fiber Optik Connection's





KOTA SOLOK